

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI SEKOLAH DASAR RAYON IV (EMPAT)
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
KABUPATEN PADANG LAWAS**

TESIS

Oleh

Idah Purwari

Npm. 1720060022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **IDAH PURWARI**
NPM : 1720060022
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
Judul Tesis : Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Rayon IV (Empat) Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas



Pengesahaan Tesis
Medan, 11 Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Pembimbing II

Indra Prasetia, S.Pd., M.Si.

Diketahui

Direktur

Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi

Dr. Sulhati, MA.

UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH
DASAR RAYON IV (EMPAT) KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
KABUPATEN PADANG LAWAS**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Manajemen Pendidikan Tinggi PPs. UMSU dan Dinyatakan
Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal 11 Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Syaiful Bahri, M.AP.
Ketua

1.

2. Indra Prasetya, S.Pd., M.Si.
Sekretaris

2.

3. Dr. Sulhati, MA.
Anggota

3.

4. Dr. Salim Aktar, M.Pd.
Anggota

4.

5. Dr. Elfrianto, M.Pd.
Anggota

5.

UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

ABSTRAK

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR RAYON IV (EMPAT) KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan pendidikan dan hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri 0711 Aliaga V Tahun Ajaran 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, guru dan wali siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Data di analisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di SD Negeri 0711 Aliaga V Tahun Ajaran 2019 berasal dari BOS pusat/ Bos regular, BOS provinsi/ BOSDA, dan BOS kabupaten dengan jumlah Rp. 276. 320.000,- yang mengalokasikannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantara Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, begitu juga Standar Pendidik dan Kependidikan.

Kata Kunci: *Pembiayaan Pendidikan, BOS, Pengalokasian Dana*

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada penulis, sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Penelitian (Tesis) yang berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Rayon IV (Empat) Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas”.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, saya banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. H. Syaiful Bahri sebagai Direktur pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Hj. Sulhati., MA sebagai ketua program studi manajemen pendidikan tinggi pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H. Syaiful Bahri sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan saran membangun pada peneliti untuk menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Indra Prasetya, S.Pd., M. Si sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan saran dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Keluarga besar Sekolah Dasar Rayon IV (Empat) Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, terima kasih atas waktu dan kerjasama yang telah diberikan selama proses penelitian.

Medan, Januari 2020
Penulis

Idah Purwari
Npm. 1720060022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. kerangka Teori	11
1.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	11
1.2 Program BOS dan Program Wajar Diknas 9 Tahun yang Bermutu ..	15
1.3 Mekanisme Pelaksanaan BOS	17
1.4 Manajemen Pembiayaan dan Mutu Pendidikan	19
B. kerangka berfikir	21
C. Penelitian Yang Relevan	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Sumber Data Penelitian	28

3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.5 Teknis analisis Data	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. gambaran umum lokasi penelitian	32
B. Uraian Temuan Penelitian	36
1). Perencanaan Dana BOS di SD Rayon V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	37
2). Pemanfaatan dan Pelaporan Dana BOS SD Negeri Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	44
3). Pengawasan Dana BOS SD Negeri Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	49
4). Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di paparkan SD Negeri Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	54
C. Pembahasan	62
a. Relevansi Dana BOS Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa ..	63
b. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Kualitas Kompetensi Guru.....	68
c. Relevansi Dana BOS Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah.....	71
d. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Kompetensi Lulusan ...	74
e. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Proses Pendidikan	75
f. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Pengelolaan	76

g. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pendidikan	77
h. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Penilaian Pendidikan	78
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	9
B. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku dan alat pelajaran, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sejak digulirkannya reformasi dan telah diundangkannya UU otonomi daerah, UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (kini disempurnakan menjadi UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004), telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi

dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu otonomi pendidikan merupakan sebuah keharusan jika menginginkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas. Bentuk otonomi dalam pendidikan berbeda dengan otonomi bidang lainnya.

berhenti pada daerah di tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan.

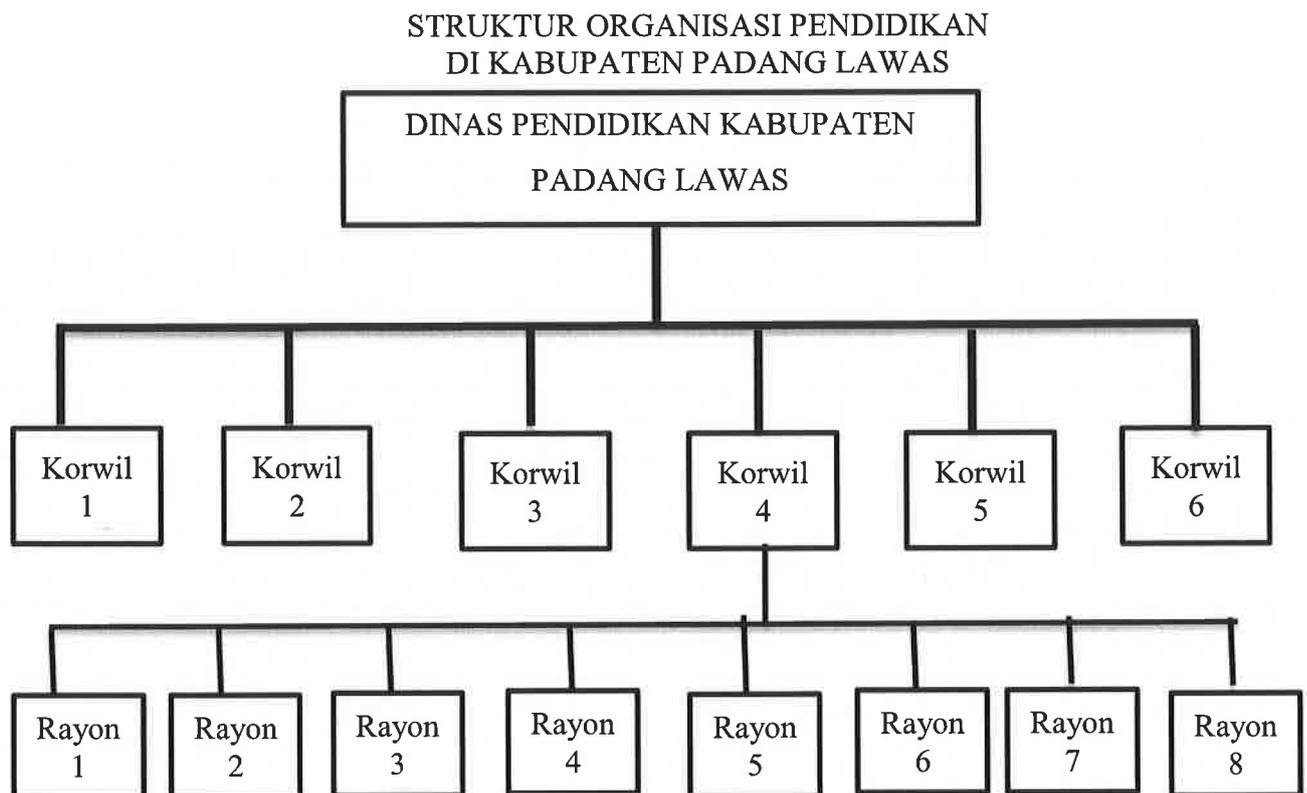
Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah di prioritaskan pada peningkatan akses bagi anak terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar (SD). Dan untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Bantuan Operasional Sekolah adalah suatu dana bantuan dari pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional disuatu sekolah, baik Sekolah Tingkat Dasar maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Bantuan Operasional Sekolah ini merupakan aplikasi dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak yang telah disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menekan jumlah anak putus sekolah. Sementara itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin, termasuk kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Hal tersebut lebih

lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh sebab itu program PKPS-BBM yang sekarang disebut program BOS, perlu dilanjutkan Program BOS merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang – Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yang termuat dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat 1 mengamanatkan bahwa : “Tiap–tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pada ayat 2 berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pada ayat 3 berbunyi : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang–Undang Untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 31 UUD 1945, khususnya ayat 3, maka pemerintah membuat undang–undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Sistem Pendidikan Nasional mempunyai visi mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan untuk dapat mencetak manusia Indonesia yang berkualitas, maka diperlukan adanya suatu penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar. Disamping itu BOS (Bantuan Operasional Sekolah) juga bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi siswa

Berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti dilakukan di SD Negeri Rayon IV (Empat) kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, bahwa penggunaan dana BOS masih kurang mendukung operasional dan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rayon IV kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Hal ini dikarenakan BOS belum bisa memenuhi seluruh unit *cost* per siswa per bulan di sebabkan BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk biaya rutin pendidikan di SD Negeri Rayon IV kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Ditambah lagi adanya larangan kepada sekolah dasar untuk menarik apapun sumbangan dari orang tua. Padahal dana BOS yang diterima sekolah hanya Rp 66.600,00 per siswa/per bulan atau Rp 800.000,00 per siswa/tahun jelas tidak memadai. Hal ini dikarenakan jumlah siswa yang sedikit tertampung di SD Negeri Rayon IV Sebelum saya paparkan tabel alokasi dana BOS dan kebutuhan di SD Negeri Rayon IV, akan saya gambarkan struktur organisasi pendidikan di kabupaten Padang Lawas.



Tabel 1 Alokasi Dana BOS dan Kebutuhan
di SD Negeri Rayon IV (Empat)Kecamatan Hutaraja TinggiKabupaten Padang
Lawas Pertahun

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Penerimaan BOS (Rp)	Kebutuhan (Rp)/Tahun
1	SD Negeri 01	240	190.000.000,00	225.000.000,00
2	SD Negeri 02	189	151.200.000,00	205.000.000,00
3	SD Negeri 03	156	124.800.000,00	212.000.000,00

Berdasarkan tabel 1 di atas,persoalan perekonomian masyarakat di SD Negeri 01, dan jumlah penduduk yang memenuhi usia sekolah di SD Negeri Rayon IV sangat sedikit. Selain itu juga, SD Negeri Rayon IV merupakan daerah yang baru berkembang ditinjau dari percepatan pembangunan daerah-daerah lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara hal ini juga sangat mempengaruhi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dengan adanya kesulitan dana, maka SD Negeri Rayon IV menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan-kegiatan

pendidikan, misalnya ekstra kurikuler, peningkatan kompetensi guru, sarana dan fasilitas belajar seperti perpustakaan, sarana ibadah, sarana olah raga sebab terhalang minimnya BOS yang diperoleh serta ada ketentuan penggunaan tersebut. Guru juga mendapat pengaruh negatif, karena guru yang sebelumnya biasa menerima pembayaran dari sekolah untuk kelebihan jam mengajar dan transportasi menjadi tidak ada. Sehingga, guru kurang bersemangat dalam mengajar dan ini jelas berpengaruh kepada kualitas pembelajaran. Keterlambatan dalam penyaluran dana BOS juga memberikan dampak negatif terutama Sekolah Dasar Negeri hanya mengandalkan dana BOS. Pembayaran honorarium untuk guru honorotomatis juga terlambat. Sehingga, menyebabkan kinerja dari guru menurun dan kualitas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah juga menurun.

Namun meskipun demikian, ditengah persoalan minimnya penerimaan dana BOS tersebut tidak sepenuhnya menjadi kendala bagi SD Negeri yang ada di Rayon IV untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran serta operasional sekolah, hal ini disebabkan manajemen pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara baik. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Rayon IV kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, diperoleh informasi bahwa mereka (sekolah) dapat mengelola dana BOS secara efektif meskipun dana BOS yang diterima oleh sekolah masih sangat terbatas. Terutama untuk kegiatan operasional rutin, peningkatan sarana belajar dan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian tentang “Manajemen Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Untuk Meningkatkan

Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Rayon IV kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas”.

B. Fokus Penelitian

Mengutip pendapat Mulyono (2010:192) menyatakan pengelolaan dana BOS yang baik yaitu (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, serta (3) pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Penggunaan dan BOS dilakukan berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, menyangkut penggunaan sebagai berikut :

- (1) Pengembangan Perpustakaan,
- (2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru,
- (3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa,
- (4) Kegiatan Ulangan dan Ujian,
- (5) Pembelian bahan-bahan habis pakai,
- (6) Langganan daya dan jasa,
- (7) Perawatan sekolah,
- (8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer,
- (9) Pengembangan profesi guru,
- (10) Membantu siswa miskin,
- (11) Pembiayaan pengelolaan BOS,
- (12) Pembelian perangkat komputer, dan
- (13) Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini yakni manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V ditinjau dari aspek (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, (3) pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga dana BOS mampu mencapai tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut mencakup (1) pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa, (2) pengembangan kompetensi guru, dan (3) peningkatan sarana belajar di Sekolah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas untuk meningkatkan Standar Isi.
2. Bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan.
3. Bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Proses Pendidikan.
4. Bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana.
5. Bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Pengelolaan.
6. Bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Pembiayaan Pendidikan.
7. Bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Penilaian Pendidikan.
8. Bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Pendidikan dan Kependidikan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Isi.

2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan.
3. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar Proses pendidikan.
4. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar sarana dan prasarana.
5. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar pengelolaan.
6. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar pembiayaan pendidikan.
7. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar penilaian pendidikan.
8. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V dapat meningkatkan Standar pendidik dan tenaga kependidikan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Praktis

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan serta informasi bagi semua civitas akademik tentang peranan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan yang konstruktif dalam usaha meningkatkan kualitas

pendidikan dan juga dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.

3. Bagi Penulis. Dapat menambah wawasan pengalaman baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai modal dalam meningkatkan proses belajar sesuai dengan disiplin ilmu, terutama setelah terjun ke dunia pendidikan.
- b. Manfaat Teoritis, yakni mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya meningkatkan Mutu Pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan operasional sekolah (BOS) secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil, sebagaimana menurut Depertemen Pendidikan Nasional (2007:12) bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan investasi. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah.

Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh

masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penggunaan dana BOS diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;

9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

Menurut Depertemen Pendidikan Nasional (2007:14) secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

1.2 Program BOS dan Program Wajar Diknas 9 Tahun yang Bermutu

Dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu : (1). Program pemerataan dan perluasan akses, (2) Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) Program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Menurut Dinas Pendidikan 2007 melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan wajib belajar Diknas 9 tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada siswa miskin yang tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahal biaya masuk sekolah.
4. Kepala sekolah/madrasah/ponpes diharapkan mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTS/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana tambahan (BOS) untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun secepatnya.

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite Sekolah tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan

disekolah. Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan. Namun demikian bagi warga sekolah dan masyarakat yang mampu masih diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.
3. Sekolah diharapkan dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih profesional, transparan, mandiri, kerjasama dan akuntabel.

1.3 Mekanisme Pelaksanaan BOS

Mekanisme Pelaksanaan Mulai tahun 2007, pengelolaan program BOS antara Depdiknas dan Depag dilakukan secara terpisah. Menurut Diknas (2006:18) beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan pengelolaan ini antara lain :

1. Pendanaan program BOS untuk seluruh sekolah baik negeri maupun swasta (yang izin operasionalnya berasal dari Dinas Pendidikan) adalah tanggung jawab Depdiknas, sedangkan untuk madrasah, pondok pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya (yang izin operasionalnya berasal dari Departemen Agama) adalah tanggung jawab Depag.
2. Segala bentuk kegiatan yang mencakup proses pendataan, penyaluran dana, sosialisasi, pelaporan, monitoring dan penyelesaian kasus dilakukan oleh masing-masing departemen.

3. Penyaluran dana ke sekolah/madrasah/ponpes antara Depdiknas dan Depag harus diusahakan sesuai dengan jadwal.

Mendikbud (2011: 12) pengalokasian dana BOS dilakukan sebagai berikut :

1. Tim pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes melalui tim propinsi dan Kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes, tim pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi yang dituangkan dalam DIPA propinsi.
3. Tim propinsi dan tim Kabupaten/kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah/madrasah/ponpes.
4. Tim Kabupaten/kota menetapkan sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK Penetapan sekolah umum yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan Dewan Pendidikan. Sedangkan SK Madrasah, ponpes salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya ditandatangani oleh Kepala Kandepag Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah/madrasah/ponpes salafiyah dan besar dana Bantuan yang diterima. Sekolah/madrasah/ponpes yang menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

5. Tim Kabupaten/kota mengirimkan SK Alokasi dana BOS dengan melampirkan daftar sekolah/madrasah/ponpes ke Tim Propinsi, tembusan ke Pos/bank Penyalur dana dan sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah/madrasah/ponpes perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut : (1) Alokasi BOS untuk periode Januari–September didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran yang berjalan, (2) Alokasi BOS periode Oktober–Desember, didasarkan pada data jumlah siswa tahun pelajaran berjalan. oleh karena itu setiap sekolah/madrasah/ponpes diminta agar mengirim data jumlah siswa ke tim Kabupaten/kota, segera setelah masa pendaftaran selesai.

1.4 Manajemen Pembiayaan dan Mutu Pendidikan

Pembiayaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan, karena tanpa adanya pembiayaan bisa jadi pendidikan tidak dapat berjalan dan amanat dari Undang-Undang dasar tidak akan terpenuhi. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Fattah (2008:141) bahwa:

Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena ia menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil akhir penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bermutu sulit dapat berjalan baik tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak mungkin ada kegiatan pendidikan tanpa biaya, biaya tidak hanya berasal dari pemerintah, banyak sumber-sumber biaya dapat diperoleh lembaga salah satunya uang SPP siswa. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan keberlangsungan proses pendidikan. Di sini, ketersediaan biaya sangat menentukan capaian tujuan dan target pendidikan. Menurut Juran (2006:12) jika disematkan pada satu produk, mutu ialah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) dimaksud untuk memenuhi hajat dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan produk itu didasarkan atas lima ciri utama; (a) teknologi; yaitu kekuatan; (b) psikologis, yaitu rasa atau status; (c) waktu, yaitu kehandalan; (d) kontraktual, yaitu ada jaminan mutu produk; dan (e) etika, yaitu sopan santun. Menurut Sudradjad (2005:17) pendidikan yang bermutu adalah model pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan. Keunggulan dan kemampuan, idealnya, dihargai publik di ranah akademik, teknikal-vokasional, atau kejuruan (keterampilan), yang dilandasi oleh mutu

kompetensi profesional, personal, sosial, kepribadian, moral, serta akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*) di ranah moral, etis, dan sosial. Sudradjat (2005:19) lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia dengan kepribadian yang integratif, utuh, yaitu individu yang mampu memadukan unsur iman, ilmu, dan amal; antara ilmu, teknologi dan taqwa untuk standar lulusannya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Dan proses pendidikan tidak akan berjalan apabila tidak ada unsur pembiayaan didalamnya, oleh karena itu pembiayaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

B. Kerangka Berfikir

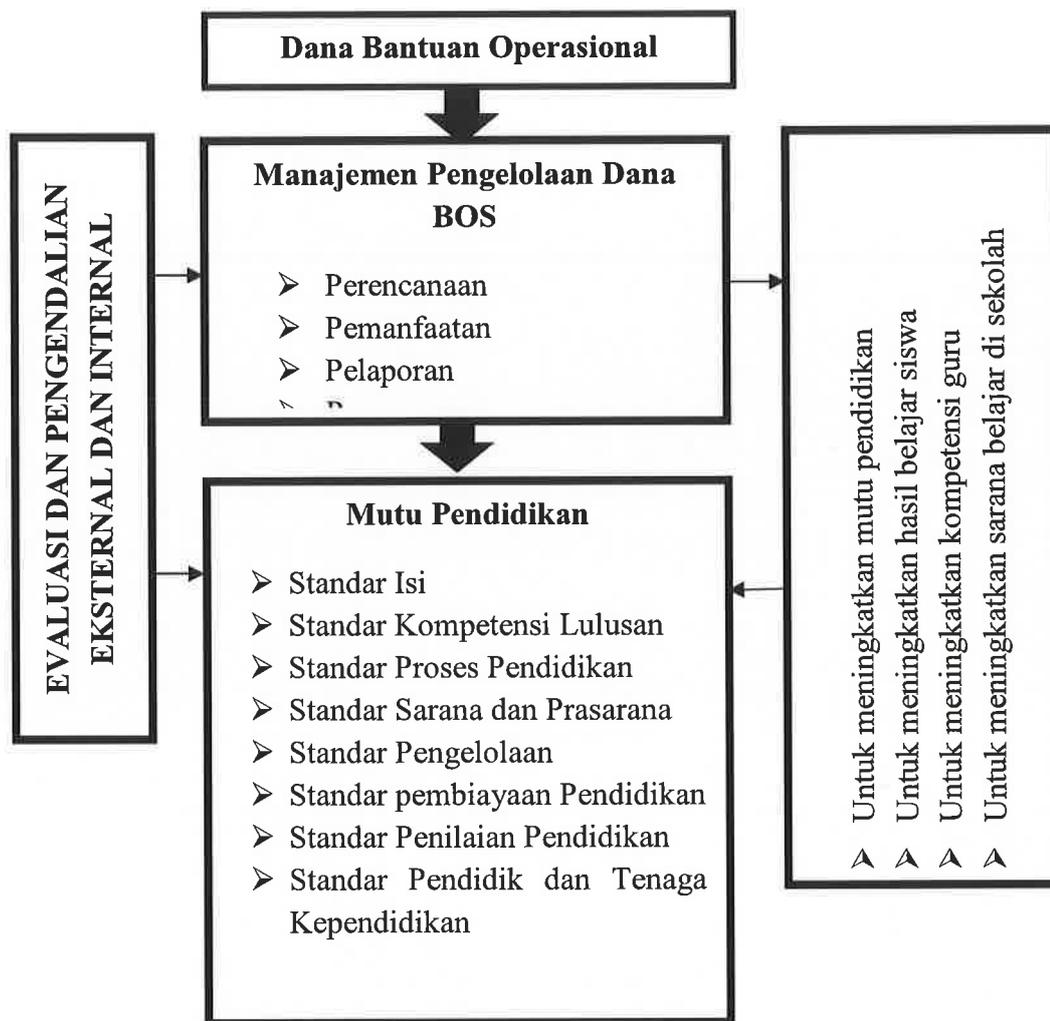
Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi berlangsungnya lembaga pendidikan, pembiayaan pendidikan terdapat beberapa sumber salah satunya dana BOS yang merupakan program pemerintah. Dana BOS diberikan kepada siswa yang kurang mampu agar bisa menjalankan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu. Pembiayaan dana BOS tidak hanya diberikan kepada sekolah atau madrasah negeri, akan tetapi diberikan juga kepada lembaga pendidikan swasta seperti pondok pesantren yang melaksanakan program wajar dikdas 9 (Sembilan) tahun, dan telah memiliki piagam penyelenggaraan.

Dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun RAPBS. RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah

nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan(Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Penyaluran dana BOS harus sesuai atau tepat sasaran, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, agar tidak terjadi kecurangan.

Berdasarkan fokus penelitian, hasil riset sebelumnya juga teori yang dijadikan acuan maka kerangka berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Berfikir di Buat Oleh Penulis

C. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian : Salman dkk (2018)

Judul : Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar

Hasil : dari penelitian ini didapatkan bahwa penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan pertanggung jawaban atas

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan BOS dan buku dibuat setiap triwulan. Pertanggung jawaban keuangan BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumber daya sekolah yang membuat SPJ BOS. Pengawasan dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat jenderal kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi dan Kabupaten/kota. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan di audit. Pemeriksaan oleh Badan Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan serta pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat.

2. Penelitian : Latifah (2017)

Judul : Manajemen Dana Bantuan Sekolah Untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran

Hasil : secara khusus merujuk pada tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Implementasi pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Garut sudah berpijak pada perundang-undangan serta peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku, namun hasilnya belum optimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima oleh pihak sekolah, dengan dana BOS pihak sekolah hanya mampu mencukupi kebutuhan operasional sehari-hari saja, yaitu terkait dengan proses pembelajaran, itupun sebatas implementasi rutinitas saja,

masih belum bisa memenuhi standar mutu yang di tetapkan, 2) sebagian pihak sekolah belum memprioritaskan penggunaan anggaran pada hal-hal yang sifatnya penting terkait dengan proses belajar mengajar peserta didik, masih kepada pemenuhan operasional sehari-hari saja. Selain itu, kepala sekolah sulit melakukan inovasi karena penggunaan dana BOS tidak boleh digunakan selain dari 13 komponen yang telah di tetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dana BOS, 3) permasalahan dalam implementasi dana BOS dalam upaya pencapaian mutu pembelajaran tingkat Sekolah Dasar cukup banyak dirasakan oleh pihak sekolah. Sistem pendidikan dan penilaian cenderung pada hasil kognitif saja dan mengabaikan ranah yang lain. Dana BOS saja tidak mencukupi untuk pencapaian pembelajaran yang bermutu. Keterlambatan pencairan dana BOS menjadi hambatan yang cukup besar serta kurangnya kesadaran dan pemahaman kepala sekolah dalam mengelola dana BOS yang transparansi dan akuntabel. Terjadi kesenjangan kebutuhan dana di Kota dan di Pelosok daerah, hal tersebut membuat pemerataan pendidikan sulit ditingkatkan, dan 4) Langkah perbaikan ke depan, kepala sekolah berupaya membuat skala prioritas, yang paling besar peruntukannya adalah untuk pemenuhan biaya pengembangan standar pendidik dan kependidikan serta proses kegiatan belajar mengajar serta standar kelulusan. Pemerintah mengkaji kenaikan dana BOS secara berkala. Kompetensi para pelaksana di sekolah perlu di tingkatkan dengan pelatihan dan sosialisasi. Peruntukan dana BOS diperluas sehingga bisa memenuhi kebutuhan sekolah lainnya.

3. Penelitian : Fitri (2014)

Judul : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi

Hasil : Mengenai pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dalam hal perencanaan, pemanfaatan serta pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana BOS dalam hal perencanaan sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan pemanfaatan penggunaan dana BOS terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir pelaporan dan pertanggung jawaban dana BOS sudah terlaksana dengan cukup baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS Sekolah dasar di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit tinggi dapat dikategorikan terlaksana dengan cukup baik. Untuk itu, perlu kiranya bagi pengelola untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana BOS agar mendapat hasil yang baik.

4. Peneliti : Wirawan dkk (2014)

Judul : Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang)

Hasil : Menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Juknis dana BOS. Serta peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukan serta pengawasan akan program dana BOS.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini bertempat di SD Negeri 0711 Aliaga V kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Adapun jadwal penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

	Tahun 2019								
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop
Studi awal	■	■							
Penyusunan Proposal		■	■						
Bimbingan Proposal		■	■						
Seminar Proposal			■	■					
Perbaikan Proposal				■	■				
Pengumpulan Data						■	■		
Interpretasi Data						■	■	■	
Penyusunan Laporan						■	■	■	■

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang dimaksud mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Moeloeng (2006:11) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk

menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Menurut Arikunto (2006:246) ada tiga macam pendekatan yang termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian kasus atau studi kasus (*case studies*), penelitian kausal komparatif dan penelitian korelasi. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti akan mengeksplorasi informasi maupun data temuan lapangan mengenai bagaimana manajemen pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 0711 Aliaga Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini berasal dari berbagai macam sumber, tergantung jenis penelitian serta data-data apa yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari Kepala Sekolah, Guru dan Siswa.
2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer seperti buku, majalah, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi. Adapun dokumen resmi dalam penelitian ini adalah dokumen tentang profile sekolah, visi & misi, Rencana

Kegiatan Tahunan (RKT) BOS, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS, data guru, dan lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara.

Menurut Arikunto (2006:125) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Peneliti menggunakan pedoman interview semi struktur yaitu wawancara dengan menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur dengan global, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Wawancara ini dilakukan dengan menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga informan tidak merasa bahwa dirinya dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, dan Guru dan Siswa.

2. Observasi.

Menurut Moeloeng (2006:174) observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan suatu alat. Metode ini adalah metode yang menggunakan pencatatan. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa kali pengamatan atau observasi ke sekolah agar peneliti dengan mudah dapat

mengetahui bagaimana kondisi sekolah, letak geografis, kegiatan ekstrakurikuler, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah yang menjadi objek penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan tentang proses dan data dilapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode umum seperti halnya metode eksperimen dan metode statistik. Analisis ini digunakan karena peneliti ingin membandingkan apakah ada persamaan atau perbedaan Peranan dana BOS dalam meningkatkan mutu Pendidikan antara SD Negeri 01, SD Negeri 02, SD Negeri 03. Proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah mengidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya tetap data ditulisi data/satuannya, berasal dari sumber mana.

2. Kategorisasi

Setelah reduksi data, kemudian melakukan kategorisasi. Kategorisasi adalah memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama label.

3.Sintesisasi

Sintesisasi adalah mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memaparkan deskripsi lokasi penelitian. Deskripsi lokasi penelitian ini ditujukan untuk memaparkan SD Negeri Rayon 0711 Aliaga V yang merupakan tempat penelitian di laksanakan. Pemaparan deskripsi lokasi penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian. Adapun hal-hal yang akan dipaparkan terdiri dari: (1) profil sekolah, (2) visi dan misi sekolah, (3) keadaan peserta didik Tahun Ajaran 2019/2020, (4) keadaan tenaga pendidik dan kependidikan, (5) keadaan sarana dan prasarana sekolah, dan (6) struktur organisasi sekolah

a. SD Negeri 0711 Aliaga V

1. Profil Sekolah

- a. Nama Sekolah : SD Negeri 0711 Aliaga V
- b. Nomor Statistik Sekolah : 101072307011
- c. Propinsi : Sumatera Utara
- d. Otonomi Daerah : Padang Lawas
- e. Kecamatan : Hutara Tinggi
- f. Desa/kelurahan : Aliaga V
- g. Jalan dan Nomor : Jalan pendidikan
- h. Kode Pos : 22765
- i. Telepon : -

- j. Daerah : Pedesaan
- k. Status Sekolah : Negeri
- l. Kelompok : -
- m. Akreditasi : B
- n. Tahun Berdiri : tahun 1985
- o. Kegiatan Belajar : Pagi
- p. Bangunan Sekolah : Tahun 1985
- q. Jarak ke Pusat Kecamatan: 20 km
- r. Jarak ke Kota Kabupaten : 25 km
- s. Jumlah Anggota Gugus : -
- t. Organisasi Penyelenggara: Pemerintah

SD Negeri 0711 Aliaga V merupakan salah satu dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten Padang Lawas yang berdiri pada tahun 1985 dengan menempati areal tanah seluas 20.000 m^2 . SD Negeri 0711 Aliaga V ini terletak di wilayah pedesaan tran unit V kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas. Sekolah ini kurang strategis karena letaknya di pedesaan dan keadaan jalan yang sedikit susah di lewati ketika hujan sehingga sedikit sulit untuk menemukan alamat SD tersebut.

2. Visi dan Misi Sekolah

Setiap sekolah pastilah memiliki visi dan misi yang di gunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan sekolah masing-masing. Visi dari SD Negeri 0711 Aliaga V adalah “Menjadikan sekolah terpercaya di masyarakat untuk bangsa dan negara dalam rangka mensukseskan wajib belajar Sembilan

tahun”. Sedangkan Misi dari SD Negeri ini adalah sebagai berikut: (1). Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi dibidang IMTAQ dan IPTEK berdasarkan pancasila dan UUD 1945, (2). Membentuk sumber daya manusia yang kreatif, reaktif dan inovatif sesuai dengan kemajuan dan perkembangan jaman.

3. Keadaan peserta Didik Tahun Ajaran 2019/2020

Peserta didik merupakan komponen utama terselenggarakannya kegiatan belajar mengajar. Tanpa peserta didik, proses pembelajaran di sekolah tidak akan terlaksana. Jumlah peserta didik di SD Negeri 0711 Aliaga V tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 367 orang yang terdiri dari 203 laki-laki dan 164 perempuan. Secara keseluruhan, jumlah peserta didik di SD Negeri 0711 Aliaga V tahun ajaran 2019/2020 tergolong banyak untuk satu sekolah. Dengan jumlah peserta didik di kelas I yaitu berjumlah 74 orang yang terdiri atas 39 laki-laki dan 35 perempuan. Pada kelas II berjumlah 77 peserta didik yang terdiri dari 42 laki-laki dan 35 perempuan. Pada kelas III berjumlah 57 peserta didik yang terdiri dari 37 laki-laki dan 20 perempuan. Pada kelas IV berjumlah 56 peserta didik yang terdiri dari 26 laki-laki dan 30 perempuan. Pada kelas V berjumlah 57 peserta didik yang terdiri dari 30 laki-laki dan 27 perempuan. Pada kelas VI berjumlah 46 peserta didik yang terdiri dari 29 laki-laki dan 17 perempuan. Keadaan peserta didik yang demikian menjadikan kelangsungan belajar mengajar di sekolah tersebut berjalan efektif.

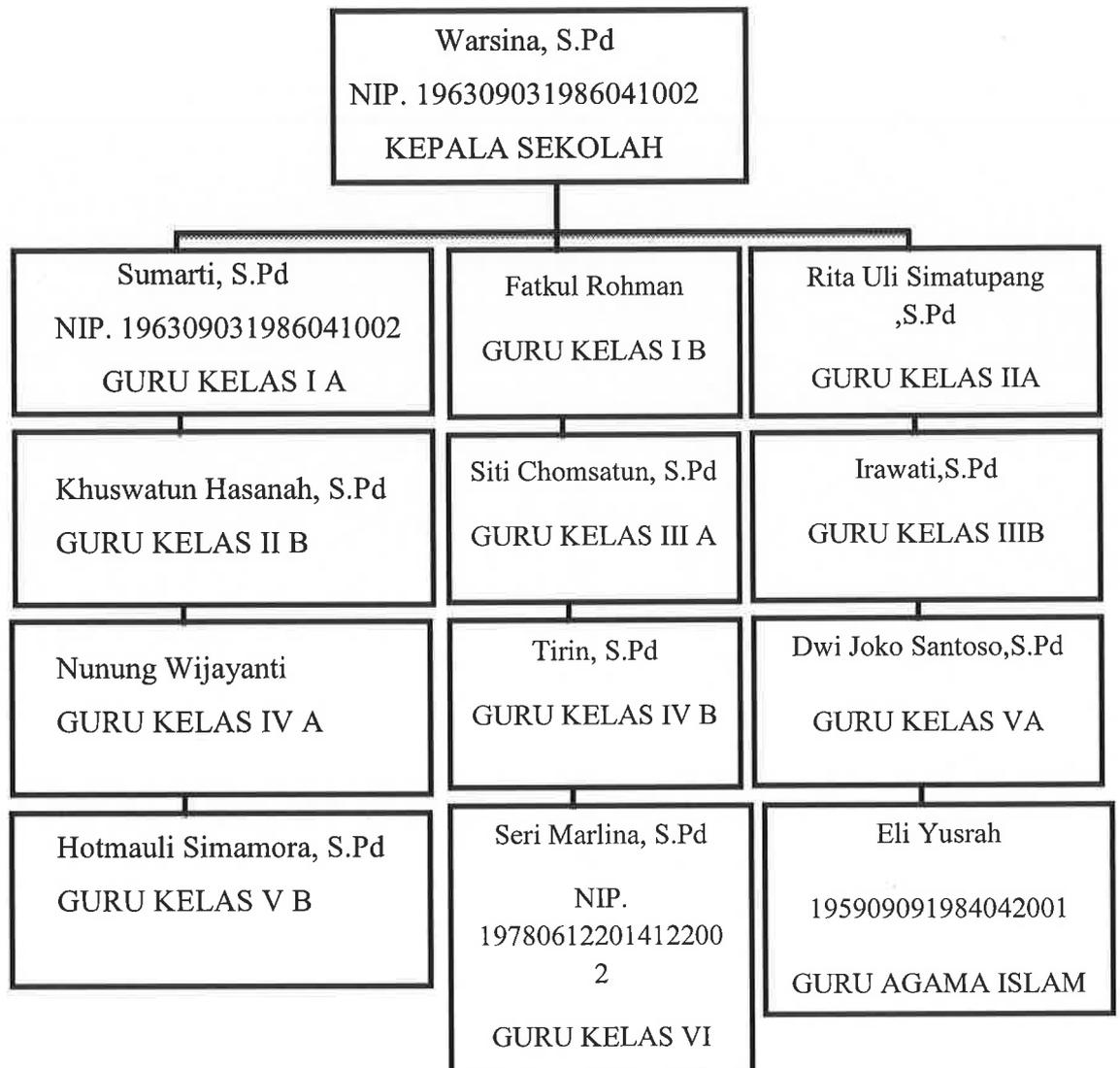
4. Keadaan Pendidik dan Tenaga kependidikan

Pendidik merupakan salah satu komponen yang penting dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, sedangkan tenaga kependidikan bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. SD Negeri 0711 Aliaga V tahun 2019/2020 memiliki 13 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari kepala sekolah yang berjenis kelamin laki-laki yang merupakan lulusan S.I, guru PNS yang berjumlah 2 orang, guru honorer 9 orang, guru agama islam 1 orang. Beberapa guru kelas merupakan lulusan S.1 dan terdapat pula guru kelas lulusan SPG dan juga SMA. Guru honorer merupakan lulusan S.1 dan juga ada yang lulusan SMA/MAN. setiap pendidik dan tenaga kependidikan telah memiliki tugasnya masing-masing.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu komponen yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar kegiatan belajar mengajar, sebaliknya sarana dan prasarana yang tidak memadai akan menghambat keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. SD Negeri 0711 Aliaga V menempati areal tanah seluas $20.000m^2$. sekolah memberikan sekolah sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sekolah lainnya. Sarana dan prasarana tersebut berupa kantor guru, gudang, toilet, Rdk, RDG. Beberapa sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 0711 Aliaga V keadaannya cukup baik dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah.

6. Struktur Organisasi Sekolah

**B. Uraian Temuan Penelitian**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak adanya program dana bantuan operasional (BOS) dari Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola melalui badan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun anggaran 2006 telah banyak manfaatnya bagi satuan pendidikan. Hal ini dituangkan dalam program Bantuan Operasional Sekolah atau yang dikenal

dengan istilah BOS untuk tingkat SD sampai dengan SMA/Sederajat, sehingga tidak ada lagi pungutan biaya sekolah alias biaya pendidikan liar. Program dana BOS yang lahir ini sudah dirasakan oleh pihak SD terkhusus SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi ditinjau dari aspek manajemen yakni (1) perencanaan, (2) pemanfaatan dan (3) pelaporan (4) Pengawasan yang dampaknya terhadap peningkatan mutu sekolah ditinjau dari (1) peningkatan hasil belajar siswa, (2) pengembangan kompetensi guru, (3) peningkatan sarana belajar di sekolah, (4) Peningkatan Pendidik dan Kependidikan, (5) Peningkatan Proses Pendidikan, (6) Pengembangan Pengelolaan, (7) Peningkatan Pembiayaan Pendidikan, (8) Peningkatan Penilaian

Sebagaimana uraian di atas, berikut pemamaparan temuan penelitian terkait dengan “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas”, ditinjau dari beberapa aspek sebagaimana diuraikan berikut.

1). Perencanaan Dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan pendidikan di Indonesia, dalam kenyataan yang terjadi, masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam

penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah muncul terkait dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS, dan mengenai ketidakefektifan pengelolaan dana BOS oleh pemerintah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Sebagaimana menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak penerima Dana BOS SD untuk melaksanakan Pengelolaan Dana BOS SD. Pemberian kebebasan ini mencakup perencanaan pengelolaan sebagaimana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing sekolah penerima Dana BOS SD. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 0711 Aliaga V menyebutkan bahwa :

Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara kualitatif) dan bila itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai,...sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahunan, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan Dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.” (Wawancara, 12 Agustus 2019, Pukul 10.00 – 11.00 wib)

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang guru senior SD Negeri

0711 Aliaga Vyang menerangkan:

Saya bertugas di SD Negeri selaku pengajar sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini mengetahui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sejak Tahun Anggaran 2006 telah diterima oleh pihak sekolah SD kami sampai dengan tahun anggaran saat ini. (Wawancara, 12 Agustus 2019, Pukul 10.00 – 11.00 wib).

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, dapat dikatakan sejak adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut maka keuangan dari pihak sekolah SD Negeri di Kecamatan Hutaraja Tinggi setiap tahun anggarannya bertambah dan bermanfaat bagi sekolah, dimana pertambahan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2019 yang telah menetapkan jumlah besaran dana Bos yang diterima oleh pihak sekolah didasarkan pada perkalian jumlah siswa setiap tahunnya. Selain itu, dalam perencanaan Dana BOS di SD Negeri Huta Raja Tinggi, sekolah harus menentukan pertimbangan tugas dan tujuan pada tahun anggaran Dana BOS SD. Penentuan tugas dan tujuan didasarkan atas pengajuan dari guru dan karyawan yang mana dirangkum dalam RKAS dan RAB BOS SD. Hasil dari penyusunan tersebut akan dimintakan pertimbangan kepada Komite

Sekolah, yang kemudian akan disetujui atau ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas pertimbangan dari Komite Sekolah.

Selain itu, dalam perencanaan dana BOS, pihak sekolah menyusun rencana BOS berkaitan dengan perencanaan kegiatan tahun 2019 diantaranya data kesiapan menyelenggarakan Ujian Nasional serta data siswa kelas akhir yang akan mengikuti Ujian Nasional baik UNBK maupun UNKP; Data RKAS dan Realisasi BOS sampai dengan Oktober 2019, serta jumlah tenaga guru dan kependidikan diluar PNS. Selain itu, sebagaimana temuan dilapangan bahwa semangat dan antusias seluruh Sekolah Dasar penerima BOS menyampaikan perencanaan dana BOS oleh pihak sekolah telah sesuai antara perencanaannya dengan realisasi dan pemanfaatan BOS, bagaimana dana yang telah diarahkan penggunaannya agar dapat termanfaatkan secara maksimal. Sebagaimana wawancara dengan Komite sekolah SD Negeri 0711 Aliaga V menyebutkan bahwa :

Penggunaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sekolah, dilakukan secara efisiensi, dan manfaatnya sesuai kesesuaian dengan *outcome* yang telah di prediksi. Dalam program BOS, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. (Wawancara, 13 Agustus 2019, Pukul 08.00 – 09.20 wib).

Dan hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 0711 Aliaga V menyebutkan bahwa:

Pengelolaan dana bos di SD Negeri 0711 Aliaga V alhamdulillah sudah berjalan dengan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos, namun dalam pengelolaan dana bos ini terkadang banyak kendala-kendala yang di dapat dalam proses pencairan dana BOS, tetapi itu semua terlaksana dengan baik berkat kerjakeras semua staf-staf di sekolah dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan dana bos juga dilakukan dengan pembukuan dan publikasi kepada wali murid. Tim pengelola dana bos juga melakukan atau melaksanakan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos baik dari segi swakelola, pelaporan dan pembukuan, transparan, saling percaya, demokratis dan keefektifan. Semua pengelolaan berpanduan pada juknis

dana BOS yang telah ditetapkan pemerintah (Wawancara, 16 September 2019, Pukul 10.00 – 10.30 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan MBS menuntut partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif di dalam operasi sekolah. Partisipasi yang insentif menjadi keharusan karena sekolah harus makin banyak tumbuh dengan menyangga sendiri secara finansial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi/kontribusi. MBS menuntut partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif di dalam operasional sekolah. Partisipasi yang insentif menjadi keharusan karena sekolah harus makin banyak tumbuh dengan menyangga sendiri secara finansial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas.

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih dimasa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang, arah, tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Perencanaan dalam anggaran dana BOS ialah kegiatan merencanakan sumber dana bantuan operasional sekolah untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Hasil penelusuran dilapangan, diketahui bahwa perencanaan dana BOS oleh SD Negeri 0711 Aliaga V mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah atau RKTS. Adapun Kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost-effectiveness*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
2. Pengembangan Rencana Kerja Tahunan Sekolah. Proses pengembangan ini pada umumnya menempuh langkah-langkahpendekatan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pada tingkat kelompok kerja. Kelompok kerja yang dibentuk sekolah, yang terdiri dari para pembantu kepala (guru dan wakil kepala sekolah) memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-

kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak menggunakan kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan yang tersedia.

- b. Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RKTS
- c. Sosialisasi dan legalitas. Pada tahap ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RKTS kepada pihak Dinas Pendidikan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

Berdasarkan hasil analisis pada aspek perencanaan di atas, dalam perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V, hal utama dilakukan adalah menyusun RKTS. RKTS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RKTS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah

nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKTS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran memerhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan langsung oleh masyarakat. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RKTS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. Jelas apabila program BOS dapat diartikan sebagai bantuan pendidikan gratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SD. Pelaksanaan BOS yang telah dilaksanakan di SD Negeri 0711 Aliaga Vsangat bermanfaat dalam penuntasan pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing global

2). Pemanfaatan dan Pelaporan Dana BOS SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Setiap organisasi memerlukan suatu pengelolaan agar proses kegiatan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien. Pengelolaan suatu organisasi dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan sampai pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Sekolah SD Negeri 0711 Aliaga V tentang bagaimana pemanfaatan BOS apakah sesuai dengan 7 prinsip pengelolaan atau pemanfaatan dana BOS, memperoleh jawaban bahwa:

Pengelolaan dana bos di SD Negeri 0711 Aliaga Valhamdulillah sudah berjalan dengan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos, namun dalam pengelolaan dana bos ini terkadang banyak kendala-kendala yang di dapat dalam proses pencairan dana BOS, tetapi itu semua terlaksana dengan baik berkat kerjakeras semuastaf-staf di sekolah dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan dana bos juga dilakukan dengan pembukuan dan publikasi kepada wali murid. Tim pengelola dana bos juga melakukan atau melaksanakan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos baik dari segi swakelola, pelaporan dan pembukuan, transparan, saling percaya, demokratis dan keefektifan. Semua pengelolaan berpanduan pada juknis dana bos yang telah ditetapkan pemerintah (Wawancara, 16 September 2019, Pukul 10.00 – 10.30 Wib)

Secara tidak langsung manfaat BOS dalam penyelenggaraan pendidikan adalah membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu. Hasil wawancara dengan Wali siswa SDN 0711 Aliaga V menyebutkan bahwa :

Penggunaan dana BOS untuk pendidikan sangat dirasakan manfaatnya cukup banyak. Masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tahap awal penerapan program ini di sekolah adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi peserta didik yang kurang mampu. (Wawancara 12 Agustus 2019, Pukul 10.00 – 11.00 wib).

Dan Hasil wawancara kepada kepala SDN 0711 Aliaga V menyebutkan bahwa:

Penggunaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sekolah, dilakukan secara efisiensi, dan manfaatnya sesuai kesesuaian dengan *outcome* yang telah di prediksi. Dalam program BOS, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. (Wawancara, 13 Agustus 2019, Pukul 08.00 – 09.20 wib).

Sebagaimana uraian di atas, bahwa program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu sesuai dengan 8 standar dari BSNP, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sejalan dengan itu, merangkum hasil wawancara peneliti dengan para Kepala Sekolah di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi menyebutkan bahwa “ melalui program ini yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: (1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun; (2) tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah; (3) lulusan SD harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke SMP; (4) kepala sekolah mengajak peserta didik SD yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah ditampung di SMP sementara, apabila terdapat peserta didik SMP yang akan putus sekolah agar diajak kembali ke bangku sekolah; (5) kepala sekolah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akutabel;

(6) BOS bukan penghalang bagi peserta didik, orang tua, atau walinya dalam pemberian sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah”.

Hal-hal diatas menjelaskan peranan BOS dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun. BOS adalah bantuan biaya operasional sekolah namun bukan penghalang bagi sumbangan sekolah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan para guru di SD Negeri 0711 Aliaga V, dimana para guru juga menilai bahwa apa yang dikerjakan sekolah sudah sesuai dengan juknis dana bos. Artinya, dalam hal ini pengelolaan dana bos di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi sesuai dengan yang ada dalam juknis tersebut. Pengelolaan dana bos yang dilakukan melalui proses pembukuan dan pelaporan bersama tim dana bos. Namun dalam hal penggunaan untuk pembangaunan sudah terbilang cukup baik tetapi masih kurang memadai dalam standar pendidikan nasional karena keterbatasan dana yang diperoleh, karena dana bos ini tidak bisa untuk dijadikan satu-satunya pegangan dalam pembangunan. Artinya, SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ini masih membutuhkan dana lain untuk pembangunan yang memadai dalam standar pendidikan nasional, selain itu juga memenuhi kebutuhan siswa yang kurang mampu dengan dan bos, yaitu dengan menyediakan sarana belajar seperti seragam sekolah, dan tas. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana bos di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas masih berjalan sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos. Selain itu, penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS

sekolah, yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS/RAPBS) disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Agar setiap sekolah dapat menggunakan dana BOS sesuai ketentuan penggunaan dana dan untuk mengukur seberapa besar ketepatan penggunaan dana BOS pada setiap sekolah, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan ketentuan penggunaan. Disamping itu, penggunaan dana BOS di sekolah berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara lain kepala sekolah atau dewan guru dengan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber RAPBS disamping dana yang diterima dari pemda atau sumber lain.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi dilapangan, rangkuman temuan penelitian di SD Negeri Rayon I0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi, bahwa dana BOS digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :(1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. (2) Pembelian buku teks pembelajaran dan buku teferensi untuk dikoleksi di perpustakaan. (3) Pembelian bahan-bahan habis terpakai; spidol, buku tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. (4) Pembiayaan ulang harian, ulangan

umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. (5) Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sebagainya. (6) Pengembangan profesi guru : Pelatihan, KKG/MGMP dan KJCKS/MKJCS. (7) Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan lainnya. (8) Pembiayaan layanan daya dan jasa : listrik, air, telfon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. (9) Pemberian batuan siswa transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi biaya transportasi, (10) Pembiayaan pengloaan BOS : ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. (11) Prointas utama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen I s/d 12. Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi peranannya dari BOS dan masih dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan sekolah.

3). Pengawasan Dana BOS SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Secara umum, ukuran keberhasilan pengawasan penggunaan dana BOS melalui mekanisme pelaporan tertulis penggunaan dana BOS oleh sekolah kepada pemerintah. Pengukuran pengawasan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Pandang Lawas dilakukan oleh guru, wali siswa (stakeholder) SDN 0711 Aliaga V dan korwil atau tim BOS Kecamatan sebagai tangan kanan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam hal melakukan pengawasan langsung kesekolah-sekolah untuk melihat SPJ dan Pembukuan. Selain itu, pengawas penggunaan dana BOS di SD Negeri Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi melalui proses laporan kepada komite sekolah melalui

pertemuan rutin setiap triwulan sekali, dan tim manajemen BOS Kabupaten. Dalam pelaporan, pihak Sekolah telah melakukan proses komunikasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah, misalnya dapat berkonsultasi dengan KORWIL perihal yang belum jelas ataupun konsultasi mengenai pelaksanaan dan pembuatan laporan. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 0711 Aliaga V, menjelaskan :

Pada dasarnya proses pengawasan penggunaan dana BOS melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, melibatkan komite sekolah dan juga pengawas dari dinas Pendidikan, terkait dengan konsultasi, pihak sekolah senantiasa berkonsultasi. Bila belum mendapat jawaban dari KORWIL, bisa ditanyakan langsung ke Tim Manajemen BOS Kabupaten. (Wawancara 2 September 2019, Pukul 09.00 – 11.00)

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa alur mekanisme pelaporan dana BOS, dapat dijelaskan untuk alur pengawasannya yaitu dengan cara SD membuat laporan pertanggungjawaban yang dikirim ke KORWIL, selanjutnya KORWIL melakukan rekap laporan dan rekap dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten, sekolah juga laporan langsung ke pusat melalui yang dikirim secara online melalui aplikasi pelaporan dana BOS yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi diperoleh informasi bahwa para kepala sekolah di masing-masing sekolah telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah. Adapun pengawasan yang dilakukan Kepala Sekolah berupa memeriksa laporan keuangan yang terkait dengan penggunaan dana BOS setiap bulan, Kepala Sekolah juga sering melakukan komunikasi dengan bendahara terkait dengan dana yang sudah dikeluarkan dengan melihat langsung apakah barang yang dibeli itu

ada, sehingga Kepala Sekolah benar-benar bertanggung jawab atas dana yang sudah dikeluarkan. Selain Kepala Sekolah rutin mengadakan pengawasan setiap akhir bulan sekolah juga rutin membuat laporan secara triwulan kepada dinas.

Selanjutnya, wawancara dengan para pengurus komite sekolah di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi, memperoleh kesimpulan bahwa untuk publikasi dana BOS di Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi telah transparan. Sebagaimana wawancara dengan komite SD Negeri 0711 Aliaga V menyebutkan bahwa :

Penggunaan dan pengawasan dana BOS di sekolah sudah transparan, konkretnya ialah ketika ada rapat penyusunan RAPBS pihak sekolah selalu menampilkan gambaran keuangan sekolah lewat LCD, dulu sempat di print dan dibagikan kepada semua yang hadir namun, karena dianggap boros kertas akhirnya hanya di print beberapa, namun tetap ditampilkan lewat LCD ketika ada pertemuan. Sejauh dari hasil wawancara saat ini sekolah telah berusaha untuk mengalokasikan dana BOS sesuai dengan RAPBS yang telah disusun pada awal tahun pelajaran. (Wawancara 12 Agustus 2019, Pukul 10.00 – 11.30)

Disamping itu, wawancara dengan komite SD Negeri 0711 Aliaga V juga memperoleh informasi bahwa

Laporan dana BOS sudah sesuai pedoman dana BOS..., pelaporan merupakan penanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiaya dana BOS dan setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. Semua kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah telah dilakukan SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan BOS.

Keberhasilan pengawasan penggunaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi tentunya tidak lepas dari peran sekolah, KORWIL, Pengawas, Komite dan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam melaksanakan program dana BOS. Dalam pengawasan, sekolah pada hakikatnya

mempunyai peran keterbukaan dengan memberikan paparan serta bukti penggunaan dana BOS berbentuk laporan SPJ atau pembukuan saat ada pertemuan yang dilaksanakan setiap triwulan. Tentunya tim manajemen Bos dan kepala SD mempunyai peran dalam pembuatan laporan sebagai acuan pengukuran hasil sebagai wujud pengawasan. Laporan yang dibuat mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan, untuk tata cara administrasi dan format laporan tidak banyak mengalami perubahan sehingga memudahkan untuk melakukan pengukuran hasil dan perbedaannya bisa dilihat dari tahun ke tahun. Selain melakukan pemaparan terhadap laporan BOS, setiap sekolah juga diwajibkan untuk melakukan laporan secara online. Selain itu, dalam pengawasan laporan penggunaan dana BOS SD, pemerintah sudah menerapkan sistem online, dilakukan dengan bantuan teknologi yaitu BOS online dan data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen). BOS online berfungsi untuk upload laporan sehingga langsung diterima oleh Tim Manajemen BOS Pusat.

Sebagaimana penelusuran peneliti di lapangan, tentang website BOS online dan juga hasil wawancara dengan Pengawas SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa:

Website BOS berisikan informasi mengenai penggunaan dana per komponen, penyaluran dana, pengaduan, dan resume laporan. Sedangkan, Dapodikdasmen berfungsi untuk menjangkau data pokok pendidikan (Satuan Pendidikan, Peserta Didik serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan yaitu BOS, Bansos, Tunjangan, UN, dan lain-lain. Dapodikdasmen telah mulai dijalankan pada tahun 2015 sebagai langkah awal, tapi masih dibarengi dengan sistem manual. Menurut petunjuk teknis sekolah diwajibkan melakukan laporan secara online dilakukan setiap triwulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan dengan adanya laporan online tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten dapat memantau dan mengendalikan sekaligus mendorong agar sekolah-sekolah tertib dalam memberikan laporan sebagai langkah pengawasan. Hasil temuan dilapangan juga menunjukkan bahwa proses pelaporan BOS ada dua macam yaitu laporan BOS online yang langsung ke Pusat dan laporan melalui KORWIL. Laporan yang diserahkan pada KORWIL dalam bentuk hard copy. Berkaitan dengan BOS, Dinas Pendidikan Kabupaten membangun sarana komunikasi melalui telepon seluler yaitu melalui telepon, sms dan aplikasi *whatsapp* untuk mempermudah komunikasi antar pelaksana dan pengawasan. Dinas Pendidikan Kabupaten dan tim manajemen BOS Kabupaten berperan untuk mengingatkan dan melakukan pembinaan untuk mengantisipasi dan mengatasi adanya penyimpangan dana BOS dilapangan.

Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan dari pihak KORWIL dilapangan, guna pengawasan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai tim manajemen BOS Kabupaten dalam mengatasi penyimpangan dengan melakukan teguran secara lisan maupun tertulis dan perbaikan laporan kepada pihak sekolah penerima dana BOS. Namun, dalam hal untuk pemberiansanksi, Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk memberikan sanksi, sedangkan sanksi dilakukan oleh lembaga pengawasan yang resmi seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat. Dalam hal sanksi, terdapat dua jenis sanksi dalam hal penyelagunaan, yakni administratif dan kepegawaian. Sanksi administratif yaitu, untuk menangguhkan cairan dana sementara waktu, sedangkan untuk memberhentikan cairan dana tidak

diperkenankan. Namun, terkadang di pihak Kabupaten tidak terjadi adanya penangguhan karena kesalahan tersebut bisa teratasi sehingga tidak sampai adanya penangguhan. Sanksi kepegawaian yaitu, adanya penurunan pangkat golongan (bisa kepada kepala sekolah, guru atau semua tim manajemen BOS di sekolah), namun selama ini, penyimpangan penggunaan dana tidak pernah terjadi di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi. Selain sanksi tersebut, bila ada penyimpangan penggunaan dana, maka sekolah atau oknum yang melakukan harus mengembalikan dana tersebut melalui bendahara atau transfer ke bank, dan selanjutnya akan diproses sanksi lainnya oleh pihak pemerintah. Agar dana tersebut bisa digunakan kembali sesuai aturan yang ada di Juknis. Namun demikian, pada umumnya penanganan penyimpangan dinilai sudah maksimal dan Dinas Pendidikan Kabupaten tetap terus berusaha untuk meningkatkan pembinaan karena masih ada yang belum sepenuhnya memahami Juknis dan penggunaan dana BOS.

4) Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di memaparkan SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Untuk melihat dampak langsung dari program BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan tentulah merupakan hal yang sulit. Karena program BOS memang tidak secara langsung dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Tetapi kontribusi program BOS terhadap peningkatan kualitas dan mutu sekolah memiliki fase yang berjenjang. Secara historis program BOS lebih bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak didik untuk mengecap pendidikan. Persoalan dana yang selama ini dianggap menjadi kendala utama anak didik dan

sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, setidaknya bisa terurai dengan adanya BOS ini. Dengan demikian situasi terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif bisa terjadi, karena persoalan mendasar tersebut sudah coba ditangani oleh pemerintah. Walau tidak menafikan bahwa masih banyak faktor-faktor lain yang harus dibenahi untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan berkualitas, tetapi setidaknya dengan mengurai persoalan dana tersebut, syarat dasar terlaksananya pendidikan sudah dipenuhi. Dengan meningkatnya partisipasi anak didik di sekolah, dan terbantunya sekolah dalam melaksanakan PBM, diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Faktor lain yang membuat program BOS tidak bisa diukur langsung pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara nasional adalah karena program BOS hanya dialokasikan untuk siswa SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat serta SMA/ Sederajat. Artinya masih butuh proses yang panjang untuk melihat kontribusi program BOS terhadap pengembangan SDM dan lainnya di sekolah. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran program BOS telah membantu para siswa, orang tua siswa dan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Program ini sangat berkontribusi besar terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Adanya program BOS ini setidaknya telah membantu para orang tua mengurangi biaya yang harus ditanggung untuk menyekolahkan anak. Walau label “sekolah gratis” belum bisa terwujud sepenuhnya oleh program BOS ini, akan tetapi sebagaimana juga diklaim pemerintah bahwa dampak BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran

dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang. Banyak orang tua siswa yang mengaku bahwa dengan adanya program BOS ini, biaya yang harus mereka keluarkan untuk membiayai anak menjadi lebih ringan. Dengan demikian pihak sekolah pun menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan pendidikan, karena beban biaya sebagian besar sudah ditanggulangi dana BOS.

Dengan demikian, kontribusi konkrit program BOS terkhusus di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi ini, dapat dijelaskan mampu mendongkrak kualitas pembelajaran di sekolah sebagaimana yang diharapkan. Peran penting dana BOS bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah terkhusus di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi, diperoleh dari keterangan wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 0711 Aliaga V sebagaimana pertanyaan tentang bagaimana relevansi pengelolaan dana bos terhadap mutu pendidikan di sekolah, sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 0711 Aliaga V, yaitu:

Dalam proses belajar mengajar tentu dan pasti sekolah manapun membutuhkan dengan adanya sarana prasarana yang memenuhi standar agar bisa terlaksana dengan baik agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk itu dibutuhkanlah dana untuk menunjang sarana prasarana yang baik agar terlaksana proses belajar mengajar yang diinginkan. Dengan adanya program pemerintah yaitu bantuan operasional sekolah ini sangat membantu dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya dana bos ini sekolah bisa memberikan dana untuk renovasi atau perbaikan ruangan belajar yang sudah cukup layak dalam dunia pendidikan. Dan dengan dana BOS, sekolah bisa mengembangkan perpustakaan yaitu membeli dan memelihara buku teks pelajaran untuk para siswa dan bisa menjadi pegangan bagi para guru yang sesuai dengan kurikulum SD (Wawancara, 18 September 2019, Pukul 08.00 – 09.30 wib).

Demikian juga hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 0711

Aliaga V menjelaskan bahwa:

Bantuan operasional sekolah ini sangatlah menguntungkan bagi sekolah dalam mengadakan proses belajar yang efektif dan efisien. Artinya, semua pengelolaan dana bos harus direlevankan dengan proses belajar agar bisa menghasilkan proses belajar yang nyaman dan kondusif bagi siswa dan siswi. Apalagi di sekolah kami ini masih banyak ruangan yang ingin direnovasi untuk proses belajar mengajar yang nyaman, karena di sekolah kami ini memisahkan ruangan belajar dengan ruang lainnya....dan membutuhkan dana lebih dengan adanya dana Bos ini sangatlah membantu kami dalam merenovasi ruangan yang kurang layak. (Wawancara, 18 September 2019, Pukul 10.00 – 10.30 wib).

Kemudian, wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 0711 Aliaga V juga memperoleh informasi bahwa:

Pemberian dan pengalokasian dana bos oleh pemerintah sudah cukup relevan dengan proses belajar mengajar di sekolah kami, karena didalam proses belajar mengajar kami tidak mendapatkan kendala-kendala misalnya bangku-bangku siswa dan siswi tidak ada ditemukan yang tidak layak untuk proses belajar mengajar. Siswa yang kurang mampu atau miskin pun menerima bantuan dari dana BOS yaitu dengan dipenuhinya seragam sekolah siswa sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar. (Wawancara, 18 September 2019, Pukul 11.00 – 12.30 wib).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, terungkap bahwa relevansi pengelolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar sangatlah relevandan besar pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah, terkhusus di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dana bos yang di terima sekolah ditujukan untuk berbagai kegiatan penunjang proses belajar mengajar di sekolah, terkait peningkatan pengajaran guru, pelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Relevansi pengelolalan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi ini terhadap proses belajar mengajar sudah sesuai

atau relevan, karena setiap dana bos yang di peruntukkan terhadap sarana prasarana sekolah layak dipakai, buku-buku pelajaran tersedia secara lengkap, alat tulis di kelas tersedia, dan kegiatan ekstrakurikuler siswa juga turut meningkatkan guna mendorong peningkatan mutu belajar mengajar di sekolah. Pengelolaan dana bos yang baik akan berakibatkan baik terhadap proses belajar mengajar yaitu dengan terjangkaunya biaya, dan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, sehingga peserta didik yang kurang mampu juga bisa merasakan pendidikan yang layak untuk dirinya sebagai generasi bangsa yang lebih baik lagi.

Pada dasarnya, masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah, dan harapannya dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pengurus komite sekolah saat acara Hut Kemerdekaan RI di aula kecamatan Hutaraja Tinggi. Secara umum para pengurus komite sekolah menyebutkan bahwa:

BOS sangat membantu masyarakat dan sekolah,...tahap awal penerapan program ini adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi peserta didik yang kurang mampu". Setelah penerapan pertama berlangsung sukses, pemerintah mengubah tujuan BOS menjadi program pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah dasar dan menengah pertama negeri dan swasta. Tujuan tersebut memaksakan sekolah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah (Wawancara, 17 Agustus 2019, Pukul 11.15 – 12.30 wib).

Dapat diuraikan dari penjelasan di atas, bahwa program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dari berbagai informasi di lapangan, bahwa peneliti dapat menyimpulkan berikut:

1. BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan

2. Tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah
3. Lulusan SD harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke SMP
4. Kepala sekolah telah mendorong peserta didik SD yang lulus dan melanjutkan sekolah di SMP
5. Kepala sekolah telah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akutabel
6. BOS berguna untuk meringankan bagi orang tua, atau walinya dalam pembiayaan pendidikan siswa, dan pemberian sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Sebagaimana diketahui bahwa alokasi dana BOS di SD tiap sekolah satu tahun anggaran. untuk besar biaya satuan BOS yang diterima SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi termasuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD/SDLB Rp.800.000,00/siswa/tahun,
2. SMP Rp.1000.000,00/siswa/tahun,

Selain itu juga, informasi yang diperoleh dilapangan bahwa pelaksanaan BOS telah terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan target. Hal ini diukur dengan penyaluran dananya dilakukan secara langsung dari lembaga penyalur yang diberikan kewenangan oleh pemerintah ke rekening sekolah. Oleh karena itu, sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah atas nama lembaga yang harus di tandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Cara tersebut di anggap efektif dalam mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah yang dituju. Kemudian, pengambilan dana BOS dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai keperluan sekolah. Pasalnya, dengan dana BOS yang ada seyogyanya telah membantu pemerintah daerah meringankan biaya operasional yang ditanggung sekolah. Hal ini membuktikan bahwa BOS digunakan untuk membantu kegiatan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah yang telah mampu memenuhi kebutuhannya dapat mengalihkan dana BOS tersebut kepada siswa yang tidak mampu agar pelaksanaan pendidikan gratis terlaksana.

Sebagaimana mekanisme penggunaan dana BOS di sekolah terkhusus di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi, data lapangan menjelaskan bahwa penggunaan BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, sedangkan sarana belajar lainnya seperti computer, ATK dan lainnya.

Secara umum penggunaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi dapat dikategorisasi untuk membiayai kegiatan berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya

transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).

5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda motor, mesin genset dll).
12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi

bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;

13. Pembelian komputer (*desktop/work station*) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

Sebagaimana uraian di atas, jelas sesungguhnya program BOS sebagai bantuan pendidikan sangat relevan bagi peningkatan mutu pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih perlu dimonitoring dan evaluasi oleh semua pihak yang berkepentingan secara sungguh-sungguh untuk merealisasikan mutu dan penuntasan pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing global. Dengan adanya bantuan dana BOS, kesempatan bagi para masyarakat miskin dapat mengenyam pendidikan menjadi sangat mungkin. Dengan pendidikan, maka masyarakat Indonesia akan dapat meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih tinggi.

C. Pembahasan

Bidang pendidikan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia. Karena, pendidikan merupakan jalan utama untuk bangkit meraih kemajuan dan kehormatan bangsa. Peningkatan kualitas mutu pendidikan harus dijadikan prioritas utama. Pemerintah atau dalam hal ini Kemdiknas sebagai salah satu elemen yang paling penting dalam negara mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Dan dalam tujuh tahun belakangan ini, suatu program Kemdiknas yaitu penyaluran bantuan dana untuk sekolah atau lebih

dikenal dengan sebutan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) cukup membantu peningkatan sisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergantung pada kualitas pendidikan, terutama pendidikan formal dapat dilihat melalui proses belajarmengajar yang diselenggarakan pihak sekolah bagi seluruh peserta didiknya. Namun pada kenyataannya, dalam upaya pemenuhan pendidikan yang berkualitas, banyak sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala yang muncul. Pada umumnya, masalah atau kendala itu adalah terkait permasalahan pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, seperti kurang memadainya sarana dan prasarana yang menyebabkan kurang optimalnyapenyelenggaraan proses belajar mengajar di berbagai sekolah. Suatu proses merupakan hal yang terpenting dalam pencapaian suatu tujuan. Maka, proses belajar yang optimal akan dapat mendidik para siswa-siswi menjadi pribadi yang memiliki kualitas dalam hal ilmu pengetahuan, kemampuan sertadaya saing sebagai dasar untuk menempuh tingkatan pendidikan yang selanjutnya. Dan tujuan pendidikan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga dapat tercapai.

a. Relevansi Dana BOS Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan terdahulu di atas, terkait dengan “Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas”, dapat dijelaskan bahwa secara umum menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja

Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang sebagai focus penelitian yaitu SDN 0711 Aliaga V melalui proses manajemen yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan (pemanfaatan dan penggunaan) dan pengawasan, (2) penggunaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, namun alokasi dana pada tiap-tiap item sekolah berbeda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V digunakan untuk pembelajaran praktek dan prasarana penunjangnya, sarana kegiatan pembelajaran dan komponen lain seperti honor guru ekstrakurikuler, kegiatan ujian, bahan ATK dan transportasi yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, ujian, honor guru, bahan ATK dan transportasi, (3) Kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas bisa dikatakan baik, hal ini bisa dilihat pada masalah sarana dan prasarana sekolah yang dapat teratasi dengan baik dengan tersedianya dana BOS, adanya guru ekstrakurikuler, peningkatan nilai rata-rata pada tiap-tiap kelas, serta output 100% lulus UASBN pada tiap tahunnya. Kualitas guru di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas juga bisa dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan prestasi guru yang telah semuanya di sertifikasi. Demikian juga prestasi akademik siswa, baik nilai mata pelajaran maupun ekstrakurikuler di lihat dari jumlah penghargaan yang diperoleh

di setiap perlombaan beserta peningkatan jumlah siswa baru dan pencapaian kelulusan 100%.

Pengelolaan dana BOS melalui perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan sebagaimana temuan penelitian ini menjadi sangat penting. Mengingat dana BOS sepenuhnya diperuntukan untuk kemajuan sekolah, maka setiap pihak yang berkaitan dengan sekolah (orang tua/wali peserta didik, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan kelompok peduli pendidikan), harus mengetahui alur penggunaan dana BOS. Perencanaan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban realisasi dana BOS harus diketahui oleh semua pihak yang berkaitan dengan keberadaan sekolah. Pada titik ini transparansi pengelolaan dana BOS sangat diperlukan. Sejalan dengan itu, Bafadal (2012:12) bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan bantuan yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka mendanai kegiatan operasional sekolah guna menungjung pendidikan. Dapat dikatakan bahwa dana BOS adalah bentuk perhatian pemerintah dalam menungjung penyelenggaraan pendidikan sekolah. Melalui upaya pendanaan ini, diharapkan aktualisasi atas delapan standar nasional pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Artinya, penggunaan dana BOS yang sesuai dengan perencanaan yang baik berkonsekuensi logis pada laporan yang baik yang akhirnya dapat meningkatkan mutu sekolah.

Sebagai sebuah sistem sekolah harus merencanakan anggaran dan kegiatan-kegiatan sekolah secara terjadwal dan sitematis. Dalam hal perencanaan dan penggunaan dana-dana sekolah dalam sistem tidak bisa dilakukan hanya oleh kepala sekolah atau bendahara eorang diri. Perencanaan harus melibatkan seluruh

unsur yang berkaitan dengan sekolah. Keterlibatan unsur sekolah tidak berhenti pada tahap perencanaan. Penggunaan dana BOS harus sepengetahuan seluruh unsur sekolah. Sehingga laporan dana BOS yang disampaikan kepada semua pihak di sekolah, lebih merupakan evaluasi dan refleksi atas pencapaian penggunaan anggaran, bukan perdebatan atas angka-angka fulus. Sekolah terkadang menghadapi persoalan keterbatasan waktu (untuk pertemuan pelaporan penggunaan dana BOS). Sebagaimana menurut Sugiono (2015) ada beberapa solusi di antaranya, sekolah dapat menyiapkan papan informasi perencanaan dan penggunaan dana BOS. Sekolah dapat juga melaksanakan kegiatan pertemuan bersama orang tua per triwulan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk pembahasan tentang tantangan, peluang, dan kemajuan sekolah. Selain itu sekolah juga dapat mengirim laporan pertanggungjawaban kepada dewan komite sekolah, atau sekolah-sekolah di kota dapat mempublikasikan perencanaan dan penggunaan dana BOS di website resmi sekolah. Sesuai namanya, dana operasional sekolah adalah dana yang diperuntukan untuk keberlangsungan dan kemajuan sekolah sekolah. Perencanaan, pengimplemantasian dan pertanggungjawaban dana BOS sejatinya dilakukan secara bersama-sama. Transparansi pengelolaan dana operasional sekolah menuntut partisipasi optimal dari setiap unsur sekolah.

Sekolah sebagai suatu entitas sekolah harus mampu mengelola dana BOS secara profesional dan akuntabel untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas yang akhirnya akan berdampak pada prestasi belajar siswa. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Aspek penting pengelolaan dana

BOS menurut Mulyasa (2012) dari sisi manajemen keuangan, MBS menurut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Demikian menurut Minarti (2011) pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan buku yang berisi petunjuk teknis tentang penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah tiap tahunnya. Tujuan pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis setiap tahunnya agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparansi.

Dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan. Dimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Oleh

sebab itu, penggunaan anggaran memerhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan langsung oleh masyarakat. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya.

b. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Kualitas Kompetensi Guru

Kurikulum dan panduan manajemen sekolah sebaik apapun tidak akan berarti jika tidak ditangani oleh guru profesional, karena itu tuntutan terhadap profesionalisme guru yang sering dibicarakan dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting. Fenomena menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme guru kita masih rendah. Faktor-faktor internal seperti penghasilan guru yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan profesi masih dianggap sebagai faktor determinan. Akibatnya, upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan menjadi terhambat karena ketidakmampuan guru secara finansial dalam pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan. Hal itu juga telah disadari pemerintah sehingga program pelatihan mutlak diperlukan karena terbatasnya anggaran untuk meningkatkan pendidikan guru. Program pelatihan ini dimaksudkan untuk menghasilkan guru sebagai tenaga yang terampil (*skill labour*) atau dengan istilah lain guru yang memiliki kompetensi. Satu sisi kondisi guru demikian memprihatinkan, namun di sisi lain tuntutan profesionalisme guru semakin dikedepankan. Kunandar (2011:48) menyebutkan kualitas profesionalisme guru juga ditunjukkan oleh lima sikap yakni: (1) keinginan untuk

selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; (2) meningkatkan dan memelihara citra profesi; (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya; (4) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Sebagaimana temuan penelitian menunjukkan bahwa ada efek dana BOS dengan peningkatan kualitas guru di sekolah. Sebagaimana temuan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka pengembangan guru di sekolah menjadi sangat penting. Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh SD Negeri 0711 Aliaga VHutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan profesionalitas guru. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan seperti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya yang didukung oleh dana BOS. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan. Rugaiyah (2011: 23) menyebutkan guru profesional adalah guru yang memiliki kualitas pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada peserta didik, mempunyai jiwa kreatif, inovasi, dan produktif, mampu memotivasi siswa, mampu mengkaitkan dengan lingkungan siswa, dan mampu mengintegrasikan berbagai bidang studi menjadi suatu konsep yang utuh, serta mempunyai keinginan untuk selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2011:2) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Menurut Soetjipto (1992:76) pengelolaan keuangan meliputi: kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertip administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dana BOS yang diberikan untuk sekolah dikelola dengan baik, maka akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012, bahwa program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Adapun pelatihan tenaga kependidikan dari tahun 2017 sampai dengan 2019, yaitu:

1. Tahun 2017

- a. KMD (kursus mahir dasar), perwakilan 2 orang dari sekolah

b. Workshop implementasi kurikulum 2013

2. Tahun 2018

a. KMD (Kursus mahir dasar), perwakilan 4 orang dari sekolah

b. Pelatihan guru PAI, 1 orang perwakilan dari sekolah

c. Cara pengendalian emosi , 1 orang perwakilan dari sekolah

3. Tahun 2019

a. KML (Kursus mahir lanjutan), 4 orang perwakilan dari sekolah

b. Cara mengadakan persami (observasi), 2 orang pa dan pi

c. Pelatihan penguatan kepala sekolah

c. Relevansi Dana BOS Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah.

Pada proses pembelajaran di sekolah memang guru dan siswa merupakan faktor yang dominan, karena keduanya lebih menentukan berhasil atau tidaknya dalam sebuah proses pembelajaran yang ada. Faktor yang lainnya hanya bersifat pendukung yang tergantung dengan cara penerapan yang baik oleh guru maupun siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, agar semua sumber daya yang ada terutama berupa alat atau media dapat bermanfaat semaksimal mungkin, maka perlu adanya upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan agar dapat menjadi pendukung proses pembelajaran dan kualitas sekolah dapat meningkat.

Arikunto, (2008: 273) menyebutkan sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Lebih luas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana. Sebagaimana Susilo (2008:24) sarana pendidikan yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran, adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana.

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dana BOS kepada sekolah sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas saran dan prasarana. Sebagaimana hasil penelitian dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas banyak digunakan untuk pengembangan saran dan prasarana, seperti perpustakaan yaitu untuk membeli buku-buku teks pelajaran bagi siswa dan guru untuk mendukung proses pembelajaran, dan peningkatan jumlah sarana computer pustaka dan laboratorium serta tata usaha sekolah, alat-alat tulis kantor. Selain itu, bahwa dana BOS

mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah-sekolah penerima dana BOS di bantu untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai standar minimum pelayanan melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan laboratorium dan bahan praktek. Sehingga, apabila sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang baik dapat memberikan kesan positif kepada siswa dan mutu sekolah menjadi lebih maju dan meningkat. Terlebih didukung dengan penggunaan dana BOS yang sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran maka dapat meningkatkan kualitas sekolah.

Dalam hal promosi, sekolah juga memasang spanduk sekolah bebas pungutan biaya di depan sekolah. Penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja untuk membeli alat-alat ekstrakurikuler dan sekolah menggunakan dana BOS juga untuk proses pembelajaran kontekstual. Sekolah juga melakukan pengadaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).Demikian juga untuk lomba-lomba siswa. Komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian sekolah juga menggunakan dana BOS. Sehingga siswa tidak dipungut biaya/gratis pada saat menjelang ujian tengah semester (UTS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK), dan ujian sekolah. Aspek sarana prasarana pendukung di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi juga menggunakan dana BOS dalam pembelian

bahan habis pakai seperti membeli buku tulis, pensil, spidol, dan bahan praktikum untuk laboratorium baik IPA, Bahasa, dan Komputer. Berdasarkan pemanfaatan dana BOS tersebut, jelas bahwa pemberian dana BOS kepada sekolah sangat berdampak pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

d. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Kompetensi Lulusan

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undnag No 20 Tahun 2003 tentang siste Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profi kualifikasi kemmpuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetens lulusan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkupsikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya dari satuan pendidikan yang jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dana BOS kepada sekolah sangat bermanfaat bagi peningkatan Kompetensi lulusan. Sebagaimana hasil penelitian dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan

Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas banyak digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan, seperti pada keterampilan, yaitu pada seni tari. Di sini siswa di ajari untuk menari dan bahan-bahan keperluan tari tidak di pungut biaya melainkan berasal dari dana BOS. Dengan menari ini dapat menimbulkan bakat para siswa. Dan juga terampil dalam mengeluarkan ide gerakan pada menari. Dan siswa tidak perlu khawatir tentang dana yang dibutuhkan. Karena dana keperluan perlengkapan tari masuk kedalam dana BOS. Selain itu, dapat juga ditinjau dari pengetahuan yaitu SD Negeri 0711 Aliaga V akan mengirim siswa nya pada olimpiade-olimpiade ataupun perlombaan. Yang tentunya ini bertujuan agar mengasah kemampuan pengetahuan si siswa dan juga mengasah mental siswa. Di dalam perlombaan ini, keperluan seperti transportasi dan juga keperluan lainnya tidak ditanggung oleh siswa, namun di tanggung oleh sekolah yaitu melalui dana BOS.

e. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Proses Pendidikan

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dana BOS kepada sekolah sangat bermanfaat bagi peningkatan Proses Pendidikan. Sebagaimana hasil penelitian dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas banyak digunakan untuk pengembangan Proses Pendidikan, yang dimana telah dijelaskan bahwa dalam pengembangan proses pendidikan yaitu salah satunya mengacu pada kompetensi lulusan. Dan telah terbukti bahwa SD Negeri 0711 Aliaga V telah memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah di jabarkan sebelumnya.

f. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Pengelolaan

Pengelolaan pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kesiswaan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan disamping itu

pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dana BOS kepada sekolah sangat bermanfaat bagi peningkatan Pengelolaan Pendidikan. Sebagaimana hasil penelitian dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas banyak digunakan untuk pengembangan Pengelolaan Pendidikan, yang dimana telah dijelaskan bahwa dalam pengembangan pengelolaan pendidikan yaitu salah satunya mengacu pada sarana dan prasarana. Yang dimana sarana dan prasarana SDN 0711 Aliaga V telah memenuhi. Dan telah dijelaskan sebelumnya.

g. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terbagi dua yaitu budgetair dan nonbudgetair. Pembiayaan pendidikan budgetair adalah biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. artinya biaya-biaya pendidikan yang bersifat budgetair dan nonbudgetair termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti luas. Sedangkan pengertian biaya pendidikan yang bersifat nonbudgetair yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid, dan orang tua/keluarga dan biaya kesempatan pendidikan (Nanang Fattah: 2006, 23).

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dana BOS kepada sekolah sangat bermanfaat bagi peningkatan pembiayaan Pendidikan. Sebagaimana hasil penelitian dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas banyak digunakan untuk

pengembangan pembiayaan Pendidikan, seperti pada pembiayaan pengecatan gedung sekolah. Dengan menggunakan dana BOS dapat membantu sekolah dalam pengecatan ataupun renovasi pada sekolah tersebut. Selain itu, dengan adanya dana BOS dapat membantu sekolah dalam melengkapi perataan-peralatan yang diperlukan sekolah, seperti hadiah pada kejuaraan, piala dalam perlombaan yang diadakan sekolah, dan sebagainya.

h. Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, peniaian diri, peniaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dana BOS kepada sekolah sangat bermanfaat bagi peningkatan penilaian Pendidikan. Sebagaimana hasil penelitian dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga VKecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas banyak digunakan untuk pengembangan penilaian Pendidikan, seperti pada ujian, di dalam ujian pastinya sangat dibutuhkan kertas untuk soal, dan juga jawaban. Oleh karena itu para pendidik tidak perlu khawatir dengan biaya yang akan digunakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Dengan Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka keuangan dari pihak sekolah SD Negeri di Kecamatan Hutaraja Tinggi setiap tahun anggarannya bertambah dan bermanfaat bagi sekolah, dimana penambahan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2019.
2. Ada partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orangtua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara intensif dalam pengelolaan dana BOS.
3. Perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi, dilakukan adalah menyusun RKTS. RKTS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran.
4. Penggunaan dana BOS di SD Negeri Rayon IV Kecamatan Hutaraja Tinggi khususnya SDN 0711 Aliaga V, untuk hal-hal sebagai berikut : (1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran,

- penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. (2) Pembelian buku teks pembelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. (3) Pembelian bahan-bahan habis terpakai; spidol, buktulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, gula, kopi, dan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. (4) Pembiayaan ulang harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. (5) Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sebagainya. (6) Pengembangan profesi guru: Pelatihan, KKG/MGMP dan KJCKS/MKJCS. (7) Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan lainnya. (8) Pembiayaan layanan daya dan jasa: listrik, air, telfon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. (9) Pemberian bantuan siswa transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi biaya transportasi, (10) Pembiayaan pengloaan BOS : ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. (11) Untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan sekolah.
5. Pengawasan Penggunaan Dana BOS SDN 0711 Aliaga V bahwa bahwa para kepala sekolah di masing-masing sekolah telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah. Adapun pengawasan yang dilakukan Kepala Sekolah berupa memeriksa laporan keuangan yang terkait dengan penggunaan dana BOS setiap bulan, Kepala Sekolah juga sering melakukan komunikasi dengan bendahara terkait dengan

dana yang sudah dikeluarkan dengan melihat langsung apakah barang yang dibeli itu ada, sehingga Kepala Sekolah benar-benar bertanggung jawab atas dana yang sudah dikeluarkan. Selain Kepala Sekolah rutin mengadakan pengawasan setiap akhir bulan sekolah juga rutin membuat laporan secara triwulan kepada dinas. Dan publikasi dana BOS di Negeri 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi telah transparan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan temuan-temuan penelitian ini, peneliti menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar program BOS di SD Negeri Rayon IV, khususnya SDN 0711 Aliaga V Kecamatan Hutaraja Tinggi dapat terlaksana dengan baik dan mampu mendongkrak kualitas pembelajaran di sekolah maka penggunaannya harus dikelola dengan baik, menyangkut perencanaan, penggunaan, pelaporan dan pengawasannya.
2. Agar dana BOS dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, maka harus melalui proses perencanaan yang baik. Diantaranya menyusun anggaran dan pengembangan rencana kegiatan tahunan sekolah atau RKTS. Perencanaan dan pengelolaan dan pertanggung jawaban realisasi dana BOS harus diketahui oleh semua pihak yang berkaitan dengan keberadaan sekolah.
3. Agar program BOS terlaksana dengan baik maka pemanfaatannya untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi, Supriadi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Inventarisasi dan Kajian Inovasi Pendidikan*. Jakarta: Balitbang Diknas.

Fitri, Afriliana. 2014. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Vo 2. No. 1. Juni.

<https://www.academia.edu>

<https://www.scribd.com>

<https://www.rijal09.com>

<https://media.netiliti.com>

Husanah. Yuni Pantiwati. Arina Restian. Puji Sumarsono. *Belajar dan Pembelajaran*. Malang: itan Universitas Muhammadiyah.

Ibrahim, Bafadal. 2003. *Manajemen PERLENGKAPAN SEKOLAH teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kunandar. 2011. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Latifah. 2017. *Manajemen Dana Bantuan Sekolah Untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran*. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*. Vol. 11. No. 2.

Moloeng, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risdakarya.

Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.

Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. *Equilibrium*. Vol. 5 No. 9. 2009.

Salman dkk. 2018. *Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar*. *Jurnal Administrasi Publik*. Juni.

Wirawan, Muhammad. 2014. *Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Pada Sekolah Dasar*

Negeri Percobaan 1 Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 13.No. 1.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

B. Pedoman Interview

No	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
1.	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1. Menggunakan manajemen Berbasis sekolah (MBS) yaitu Sekolah diberi kebebasan dalam Pengelolaan keuangan sesuai Kondisi dan kebutuhan. 2. Ada RAKS yang disesuaikan dengan RKT dan RKJM 3. Manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi : a. Perencanaan Anggaran b. Pelaksanaan Anggaran c. Evaluasidan Pertanggung jawaban Anggaran	1. Apakah sekolah menggunakan MBS ? 2. Apakah sekolah membuat RAKS yang sesuai dengan RKT dan RKJM ? 3. Bagaimana perencanaan anggarannya ?, a. Apakah dalam merencanakan anggaran BOS, Pengelola mengidentifikasi Tujuan sekolah ? b. Apakah ada skala Prioritas untuk suatu Kegiatan atau program Dalam merencanakan anggaran ? c. Apakah tujuan yang Hendak dicapai Dijabarkan dalam Bentuk operasional Yang dapat diukur ? d. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala Bagi pengelola dana BOS dalam Merencanakan anggaran ? 4. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan ?, a. Apakah dalam

			<p>Pelaksanaan anggaran BOS, pengelola melakukan pembukuan ?</p> <p>b. Buku apa saja yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS ?</p> <p>c. Bagaimana teknis mencatat penerimaan dana BOS ?</p> <p>d. Bagaimana teknis pencatatan pengeluaran dana BOS ?</p> <p>e. Bagaimana membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS ?</p> <p>f. Kapan dan bagaimana teknis pelaporan dana BOS ?</p> <p>g. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam melaksanakan anggaran ?</p> <p>5. Bagaimana evaluasi dan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengelola dana BOS ?</p> <p>a. Apakah pengelola anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran BOS ?</p> <p>b. Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan anggaran dana BOS ?</p> <p>c. Siapa saja yang bertindak melakukan evaluasi pelaksanaan</p>
--	--	--	--

			<p>Dan penggunaan dana BOS ?</p> <p>d. Apakah hasil evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS dijadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana BOS ?</p> <p>e. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam Pelaksanaan penilaian anggaran ?</p>
--	--	--	--

C. Pedoman Dokumentasi

No	Variabel	Indikator	Item Yang Diobservasi
1.	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1. Menggunakan manajemen Berbasis sekolah (MBS) 2. Ada RKAS yang disesuaikan dengan RKT dan RKJM 3. Manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi : a. Perencanaan Anggaran b. Pelaksanaan Anggaran c. Evaluasi dan Pertanggung jawaban Anggaran	1. Struktur organisasi Sekolah 2. dokumen kurikulum 3. dokumen RKAS, RKT dan RKJM 4. Juknis BOS 5. Dokumen Laporan Pertanggung jawaban BOS

LAMPIRAN 3 : PEDOMAN INTERVIEW UNTUK PENGELOLA DANA BOS

A. PERTANYAAN TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN

1. Apakah dalam merencanakan anggaran BOS, pengelola mengidentifikasi tujuan sekolah?
2. Apakah ada skala prioritas untuk suatu kegiatan atau program dalam merencanakan anggaran ?
3. Apakah tujuan yang hendak dicapai dijabarkan dalam bentuk operasional yang dapat diukur ?
4. Apakah dalam mencapai tujuan tersebut menggunakan analisis cost effectiveness ?
5. Apakah pengelola merekomendasikan alternative pendekatan yang akan dipakai untuk mencapai tujuan kegiatan sekolah ?
6. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam merencanakan anggaran ?

B. PERTANYAAN TENTANG PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Apakah dalam merencanakan anggaran BOS, pengelola menggunakan mekanisme tertentu yang berlaku ?
2. Bagaimana bentuk mekanisme penyusunan anggaran yang digunakan dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran ?
3. Apakah program-program anggaran dirumuskan secara jelas ?
4. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam persiapan penyusunan anggaran ?

C. PERTANYAAN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Apakah dalam pelaksanaan anggaran BOS, pengelola melakukan pembukuan ?
2. Buku apa saja yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS ?
3. Bagaimana teknis mencatat penerimaan dana BOS ?
4. Bagaimana teknis pencatatan pengeluaran dana BOS ?
5. Bagaimana membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS ?
6. Kapan dan bagaimana teknis pelaporan dana BOS ?
7. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam melaksanakan anggaran?

D. PERTANYAAN TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Apakah pengelola anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran BOS ?
2. Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan anggaran dana BOS ?
3. Siapa saja yang bertindak melakukan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS ?
4. Apakah hasil evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS dijadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana BOS ?
5. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam pelaksanaan penilaian anggaran ?

NO.	KODE REKENING	BELANJA / OUTPUT (SNP) / KOMPONEN / KEGIATAN / DETIL BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)			TRIWULAN					
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	7 = (4 x 5)	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
04		- Bahasa Indonesia Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 1.5 Pelaksanaan Ujian Harian - Kertas HVS - Kertas HVS 1.6 Pelaksanaan Ujian Mid Semester Genap 2018/2019 - Foto copy Soal mid Semester Kis I - Foto copy Soal mid Semester Kis II - Foto copy Soal mid Semester Kis III - Foto copy Soal mid Semester Kis IV - Foto copy Soal mid Semester Kis V - Foto copy Soal mid Semester Kis VI - Foto copy Lembar Jawaban - Foto copy soal Aksara Arab Melayu - Snak, Makan 3 hari 1.7 Pelaksanaan Ujian Mid Semester Ganjil TP. 2019/2020 - Foto copy Soal mid Semester Kis I - Foto copy Soal mid Semester Kis II - Foto copy Soal mid Semester Kis III - Foto copy Soal mid Semester Kis IV - Foto copy Soal mid Semester Kis V - Foto copy Soal mid Semester Kis VI - Foto copy Lembar Jawaban - Snak, Makan 5 hari - Aqua 1.8 Pelaksanaan Try Out TP. 2018/2019 - Biaya pengadaan soal Try Out kis VI - Biaya transport pengawas Try Out 1.9 Pelaksanaan Ujian Sekolah TP. 2018/2019 - Biaya pengadaan soal US kis VI 1.10 Pelaksanaan USBN TP. 2018/2019 - Biaya pengadaan soal USBN kis VI - Biaya transport pengawas USBN - Makan Minum - Spanduk USBN 1.11 Pelaksanaan Ujian Semester Genap TP. 2018/2019 - Pengadaan Soal Kis I - Pengadaan Soal Kis II - Pengadaan Soal Kis III - Pengadaan Soal Kis IV - Pengadaan Soal Kis V - Pengadaan Soal Kis VI 1.12 Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil TP. 2019/2020 - Foto copy Soal Kis I - Foto copy Soal Kis II - Pengadaan Soal Kis III - Pengadaan Soal Kis IV - Pengadaan Soal Kis V - Pengadaan Soal Kis VI 1.13 Rapor Siswa - Rapor siswa K13 PENGEMBANGAN STANDAR ISI Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 2.1 Penyusunan Silabus - Pulpen My gel - Foto copy + Jilid - Buku Standar folio 2.2 Penyusunan RPP - CD Pembelajaran Kurikulum 13 - Pulpen my gel - Foto copy + jilid - Buku standar folio	24 kl		35.000	840.000	25.290.500	5.828.050	10.703.000	2.541.550	6.218.000			
			2	x	12			150.000	100.000	100.000		50.000		50.000
			1	rim			50.000	50.000	3.478.050					
			372	lbr			450	167.400	225.000	225.000		167.400		
			500	lbr			450	225.000	234.000	234.000		225.000		
			520	lbr			450	234.000	227.250	227.250		234.000		
			505	lbr			450	227.250	236.250	236.250		227.250		
			835	lbr			450	375.750	1.161.000	1.161.000		375.750		
			2580	lbr			450	131.400	720.000	720.000		131.400		
			36	kali			20.000	720.000	2.541.550			2.541.550		
			413	lbr			450	185.650	175.500	175.500		185.650		
			350	lbr			450	175.500	200.700	200.700		175.500		
			446	lbr			450	200.700	259.200	259.200		200.700		
			576	lbr			450	259.200	324.000	324.000		259.200		
			720	lbr			450	324.000	162.000	162.000		324.000		
360	lbr			450	162.000	834.300	834.300		162.000					
1854	lbr			450	834.300	360.000	360.000		834.300					
60	kali			6.000	360.000	40.000	40.000		360.000					
2	klk			20.000	40.000	2.000.000	2.000.000		40.000					
64	set			25.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000					
4	org			100.000	400.000	960.000	960.000		400.000					
64	set			15.000	960.000	5.508.000	350.000		960.000					
64	set			37.000	5.508.000	2.368.000	2.368.000		5.158.000					
12	org			150.000	1.800.000	990.000	990.000		2.368.000					
66	bks			15.000	990.000	350.000	350.000		1.800.000					
1	bh			350.000	350.000	4.485.000			990.000					
58	set			15.000	4.485.000	870.000	870.000		4.485.000					
57	set			15.000	870.000	825.000	825.000		870.000					
48	set			15.000	825.000	855.000	855.000		825.000					
50	set			15.000	720.000	750.000	750.000		855.000					
31	set			15.000	465.000	3.918.000			720.000					
1170	lbr			450	3.918.000	526.500	526.500		3.918.000		3.918.000			
870	lbr			450	526.500	391.500	391.500		526.500		526.500			
54	set			15.000	810.000	810.000	810.000		391.500		810.000			
45	set			15.000	855.000	675.000	675.000		810.000		855.000			
44	set			15.000	660.000	2.250.000	2.250.000		675.000		855.000			
75	exp			30.000	2.250.000	2.882.000	2.882.000		2.250.000		2.250.000			
2	lbr			70.000	140.000	476.000	476.000		2.882.000		882.000			
12	exp			10.000	120.000	120.000	120.000		476.000		882.000			
12	bh			18.000	216.000	2.406.000	2.406.000		120.000		140.000			
10	keping			200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		216.000		120.000			
1	lbr			70.000	70.000	120.000	120.000		2.000.000		70.000			
12	exp			10.000	120.000	216.000	216.000		120.000		120.000			
12	bh			18.000	216.000	406.000	406.000		216.000		216.000			

NO.	KODE REKENING	BELANJA / OUTPUT (SNP) / KOMPONEN / KEGIATAN / DETIL BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	TRIWULAN				
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		I	II	III	IV	
05		Pengelolaan Sekolah 6.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan - Transport operator sekolah - Transport kepala sekolah - Biaya transport kepala sekolah				5.833.000 2.200.000 900.000 1.000.000 300.000	1.200.000	3.503.000 1.900.000 900.000 1.000.000			1.130.000 300.000
		6.2 Pengelolaan Administrasi - Biaya Transport Pengelola Administrasi - Biaya Transport Pengelola Administrasi - Biaya Transport Pengelola Administrasi	3 bh	300.000		2.200.000 900.000 1.000.000	900.000 900.000	1.000.000 1.000.000			300.000 300.000
		6.3 Pengelolaan Inventaris Barang - Transport Antar Inventaris Barang Ke Dinas Pendidikan Kabupaten - Padang Lawas - Buku Standar Folio - Kertas Double folio - Kertas HVS 10 gram - Cartridge hitam - Cartridge warna	6 bh 7 pak 5 mm 1 bh 1 bh	18.000 35.000 50.000 250.000 280.000		300.000 108.000 245.000 250.000 280.000		108.000 245.000 250.000			250.000 280.000
7.	01	PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN Pengembangan Perpustakaan 7.1 Langganan Koran/Majalah/Publikasi Berkala - Langganan Koran				46.606.900	14.196.950	14.191.500	13.236.450		4.982.000
03		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 7.2 Pelaksanaan Ujian/Evaluasi Pembelajaran Ujian Semester - Snack									
		7.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Ujian (Mid Semester) - Snack									
05		Pengelolaan Sekolah 7.4 ATK Keperluan Kantor - Pulpen My Gel - TipeX - Stapler (10) - Anak hektet - Buku Standar Folio - Spidol White Board - Spidol Permanen - Kertas HVS 70 gram - Isi ulang stempel otomatis - Lakban - Kapur tulis warna - Kapur tulis putih - Tinta Print - My Gel - Tipek - Bandolan Stempel - Tinta Stempel - Pulpen Pilot - Lakban - Spidol White Board - Spidol Permanen - Gunting - Slop Ier - Tinta printer Epson - Map - Daftar nilai - Daftar kelas - Bates pelajaran - Kwitansi - Buku Ekspedisi - Faktur - My Gel - Rol plastik - Isi ulang spidol - Spidol White Board - Kertas miika - Kertas isruk	7 ltr 1 ltr 5 bh 20 Kk 5 bh 3 ltr 2 ltr 2 mm 3 bh 10 g/g 5 Kk 15 Kk 6 ltr 2 ltr 2 bh 2 bh 2 Kk 10 g/g 1 Kk 2 bh 2 bh 4 bli 96 ltr 15 exp 15 exp 3 bh 1 bh 2 bh 2 ltr 1 ltr 1 ltr 10 Kk 1 Kk 1 bks	55.000 60.000 30.000 3.000 20.000 60.000 120.000 50.000 15.000 10.000 15.000 10.000 55.000 60.000 15.000 20.000 24.000 10.000 60.000 60.000 15.000 50.000 125.000 1.500 8.000 15.000 8.000 7.000 15.000 7.000 55.000 25.000 12.000 60.000 40.000	35.390.250 5.272.000 385.000 60.000 150.000 60.000 60.000 100.000 180.000 120.000 100.000 45.000 100.000 75.000 150.000 330.000 120.000 30.000 40.000 48.000 100.000 60.000 60.000 30.000 50.000 500.000 144.000 225.000 120.000 21.000 15.000 14.000 110.000 25.000 120.000 60.000 40.000	9.677.750 1.575.000 385.000 150.000 60.000 60.000 100.000 180.000 120.000 100.000 45.000 100.000 75.000 150.000 330.000 120.000 30.000 40.000 48.000 100.000 60.000 60.000 30.000 50.000 500.000 144.000 225.000 120.000 21.000 15.000 14.000 110.000 25.000 120.000 60.000 40.000	11.546.000 1.234.000	3.290.500 1.095.000			

NO.	KODE REKENING	BELANJA / OUTPUT (SNP) / KOMPONEN / KEGIATAN / DETIL BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	TRIWULAN			
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 5)	8	9	10	11
			6 bh	25.000	150.000				150.000	
		- Stoper	10 Kik	3.000	30.000				30.000	
		- Anak hektar	1 lsn	55.000	55.000					55.000
		- My Gel	4 Kik	12.000	48.000					48.000
		- Isi ulang spidol	2 Kik	60.000	120.000					120.000
		- Spidol White Board	2 bks	40.000	80.000					80.000
		- Kertas muka	2 bks	40.000	80.000					80.000
		- Kertas jenuk	6 bh	25.000	150.000					150.000
		- Stoper	4 Kik	3.000	12.000					12.000
		- Anak hektar	11 bh	50.000	550.000					550.000
		- Papan Absen	65 bh	5.000	325.000		805.000	738.000	1.012.000	550.000
		7.5 Pembelian Benda Pos	60 bh	8.000	480.000		480.000			480.000
		- Meterai 3000	66 bh	5.000	330.000			330.000		330.000
		- Meterai 6000	51 bh	8.000	408.000			408.000		408.000
		- Meterai 6000	100 bh	5.000	500.000					500.000
		- Meterai 3000	64 bh	8.000	512.000					512.000
		- Meterai 6000	30 bh	5.000	150.000					150.000
		- Meterai 3000	34 bh	8.000	272.000					272.000
		7.6 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	3 set	300.000	900.000					900.000
		- Pembelian Obat - Obatan/ p3k	6 hr	600.000	3.600.000					3.600.000
		- Transport Pelatihan Polisi Citik	210 ornar	15.000	3.150.000					3.150.000
		- Makan minum	12 bh	100.000	1.200.000		2.250.000			
		7.7 Peralatan Kebersihan	35 bh	30.000	1.050.000		1.200.000			
		- Tong Sampah					1.050.000			
		- Sapu ijuk								
		- - -								
		- - -								
		7.8 Pembiayaan Korespondensi Keperluan Sekolah	30 lbr	900	962.250		213.750	240.000		508.500
		- Foto copy Laporan Bulanan	300 lbr	450	135.000		27.000			27.000
		- Foto copy daftar hadir guru	15 lbr	450	6.750		135.000			135.000
		- Foto Copy Rekap Absen	100 lbr	450	45.000		6.750			6.750
		- Foto copy Aset Barang	500 lbr	450	225.000		45.000			45.000
		- Foto copy SPJ bos	3 exp	5.000	15.000			225.000		225.000
		- Jilid RKAS	300 lbr	900	270.000			15.000		15.000
		- Foto copy Laporan Bulanan	15 lbr	450	6.750					6.750
		- Foto copy Daftar hadir guru	450	900	40.500					40.500
		- Foto copy Rekap absen	500 lbr	450	225.000					225.000
		- Foto copy slip gaji	65 lbr	450	29.250					29.250
		- Foto copy SPJ BOS	9 exp	5.000	45.000					45.000
		- Foto copy RKAS								
		- Jilid RKAS								
		7.9 Pengambilan Dana BOS ke Bank/Kantor POS	2 org	225.000	450.000		600.000	450.000	850.000	150.000
		- Biaya transport jemput MOU					300.000			300.000
		- Biaya pengambilan dana BOS ke Bank					300.000			300.000
		- Biaya transport antar SPJ BOS						450.000		450.000
		- Biaya transport jemput MOU						150.000		150.000
		- Biaya transport antar SPJ BOS								
		- Biaya transport percairan dana BOS								
		7.10 Koordinasi dan Pelaporan Program BOS	1 org	100.000	100.000					
		- Transport pengambilan MOU BOS								
		- Transport pengantar SPJ BOS Tw I								
		- Biaya transport ke kantor dinas kabupaten								
		- Biaya transport ke kantor dinas kabupaten								
		- Biaya transport ke kantor dinas kabupaten								
		7.11 Rapat Penyusunan RKT/RKAS	50 org	20.000	1.000.000		1.000.000	450.000	450.000	150.000
		- Biaya konsumsi rapat penyusunan RKAS	30 org	15.000	450.000		1.000.000	450.000	450.000	150.000
		- Biaya konsumsi rapat penyusunan RKAS	30 org	15.000	450.000					450.000
		7.12 Pendataan Dapodik dan Aset								
		- Pendataan Dapodik dan Aset								

NO.	KODE REKENING	BELANJA / OUTPUT (SNP) / KOMPONEN / KEGIATAN / DETIL BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP) 7 = (4+5+6)	TRIWULAN					
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- Biaya transport pengentrian data dapodik - Biaya transport pengentrian data dapodik				500.000 600.000			500.000			
		7.13 Penyesunan Laporan				1.000.000 600.000 200.000 200.000				600.000 200.000		200.000
		7.14 Biaya pengawas pintu sekolah				1.800.000 450.000 450.000			450.000			450.000
		7.15 Biaya Minum guru dan tamu				450.000 450.000 7.379.000			450.000			450.000
		- Belanja Makan Minum Gotong Royong / Kebersihan			20.000	900.000			2.184.000			
		- Air Mineral	45 org		20.000	900.000						
		- The Sari Wangi	15 gln		8.000	120.000						
		- Gula Pasir	4 ktk		6.000	24.000						
		- Gula Tropicana	2 kg		15.000	30.000						
		- Kopi ABC	2 ktk		75.000	150.000						
		- Snack guru (5.000 x 12 orang) x 25 hari x 3 bulan	4 pack		15.000	60.000						
		- Aqua galon	3 bin		1.500.000	4.500.000						
		- Aqua gelas	8 gln		80.000	80.000						
		- Gula pasir	6 ktk		20.000	120.000						
		- Kopi ABC	10 kg		15.000	150.000						
		- Aqua galon	12 pak		15.000	180.000						
		- Aqua gelas	5 gln		10.000	50.000						50.000
		- Gula pasir	2 ktk		20.000	40.000						40.000
		- Kopi ABC	3 kg		15.000	45.000						45.000
		- Spanduk	2 pak		15.000	30.000						30.000
07		Langganan Daya dan Jasa				5.816.650			915.500			1.091.500
		7.17 Pembayaran Rekening				5.816.650			915.500			1.091.500
		- Rekening Listrik Jan-Mar 2019				619.200						
		- Pulsa modem prabayar				550.000						
		- Rekening Koperasi Miller				200.000						
		- Rekening Listrik April - Juni 2019				750.000						
		- Pulsa modem prabayar				265.500						
		- Rekening koran mitra Poldasu				250.000						
		- Rekening Listrik Juli-Sep 2019				840.450						
		- Pulsa modem prabayar				600.000						
		- Rekening koran mitra Poldasu				466.500						
		- Pulsa modem prabayar				425.000						
		- Rekening koran mitra Poldasu				200.000						
09		Pembayaran Honor				5.400.000			2.400.000			466.500
		7.18 Pengelolaan Sekolah				5.400.000			2.400.000			425.000
		- Pengganti Transport Pembina Pramuka	4 org x 3 bin		100.000	400.000						
		- Pengganti Transport Ekstrakurikuler Pelatih Olahraga	2 org x 3 bin		200.000	600.000						
		- Pengganti Transport Ekstrakurikuler Pembina Pramuka	4 org x 3 bin		100.000	400.000						
		- Pengganti Transport Ekstrakurikuler Pelatih Olahraga	2 org x 3 bin		200.000	600.000						
		- Pengganti Transport Ekstrakurikuler Pembina Pramuka	2 org x 3 bin		100.000	400.000						
6.		PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN				600.000			1.200.000			600.000
		Kegiatan Evaluasi Pembelajaran				9.600.000			2.400.000			2.400.000
04		8.1 Penyusunan Soal Ujian Semesteran				9.600.000			2.400.000			2.400.000
		- Biaya transport koreksi ujian mid semester genap	12 org		200.000	2.400.000						
		- Biaya transport koreksi ujian semester genap	12 org		200.000	2.400.000						
		- Biaya transport koreksi ujian mid semester ganjil	12 org		200.000	2.400.000						
		- Biaya transport koreksi ujian semester ganjil	12 org		200.000	2.400.000						
5 2 3		BELANJA MODAL				89.990.000			64.480.000			2.400.000
5 2 3 90 01		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				33.180.000			7.680.000			25.500.000
1.		PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN				-			-			-
2.		PENGEMBANGAN STANDAR ISI				-			-			-
3.		PENGEMBANGAN STANDAR PROSES				-			-			-

NO.	KODE REKENING	BELANJA / OUTPUT (SNP) / KOMPONEN / KEGIATAN / DETIL BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	TRIWULAN			
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 5)	8	9	10	11
03		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 3.1 Kegiatan Ekstrakurikuler kepramukaan 3.2 Pembelian Alat Peraga								
4.		PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
5.		PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SEKOLAH								
05		Pengelolaan Sekolah 5.1 Pengadaan Peralatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 5.2 Pengadaan Pelatihan/Perfengkapan Operasional Rutin				33.180.000		7.680.000		25.500.000
08		Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah 5.3 Pengadaan Mobiler - Lemari - Meja Siswa - Kursi Siswa	5 bh 20 bh 40 bh		2.500.000 350.000 150.000	25.500.000 12.500.000 7.000.000				25.500.000 12.500.000 7.000.000
010		Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 5.4 Pengadaan Laptop - Laptop Acer	1 unit		7.680.000	7.680.000		7.680.000		7.680.000
011		Biaya Lainnya 5.5 Pengadaan Mesin TIK				7.680.000				7.680.000
6.		PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN								
7.		PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN								
8.		PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN								
5 2 3 91 01		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				56.800.000		56.800.000		56.800.000
1.		PENGEMBANGAN STANDAR ISI								
2.		PENGEMBANGAN STANDAR PROSES								
3.		Pengembangan Perpustakaan								
01		3.1 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013 Buku K13	1 TA		56.800.000	56.800.000		56.800.000		56.800.000
4.		PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
5.		PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SEKOLAH								
01		Pengembangan Perpustakaan 5.1 Pengadaan AC Perpustakaan								
		5.2 Pengadaan Perabot Perpustakaan								
6.		PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN								
7.		PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN								
8.		PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN								

Mengetahui
Komite Sekolah

MURSYID

Menyetujui,
Kepala Sekolah SD Negeri 0711 Aliaga V

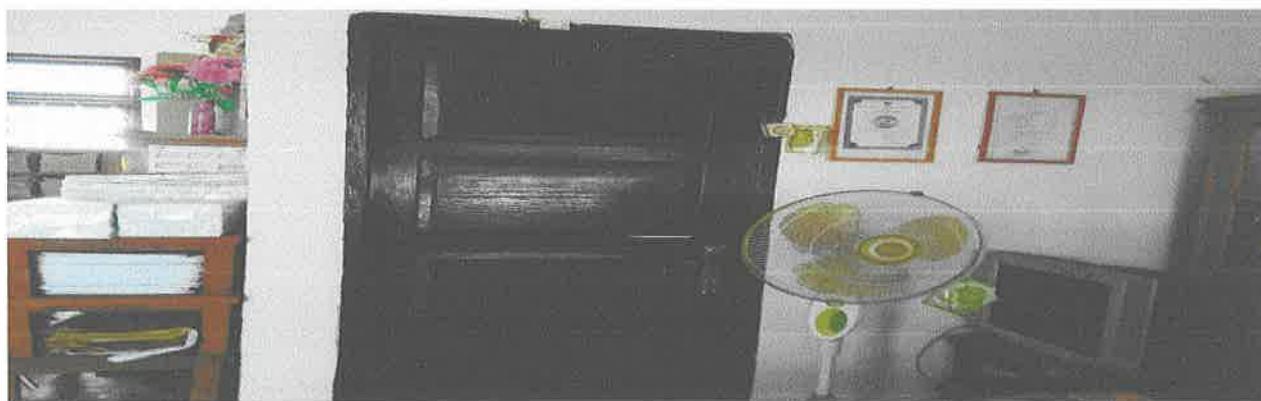
WARSINA, S.Pd
Pembina, IV/a
NIP. 19630903 198604 1 002

Aliaga V,
Bendahara Dana BOS

SUMARTI, S.Pd
NIP. 19720825 200701 2 016

LAMPIRAN 4: SARANA DAN PRASARANA**SD Negeri 0711 Aliaga V****1. Gedung Sekolah**

Pintu Gerbang Di Bangun Dengan Menggunakan Dana BOS

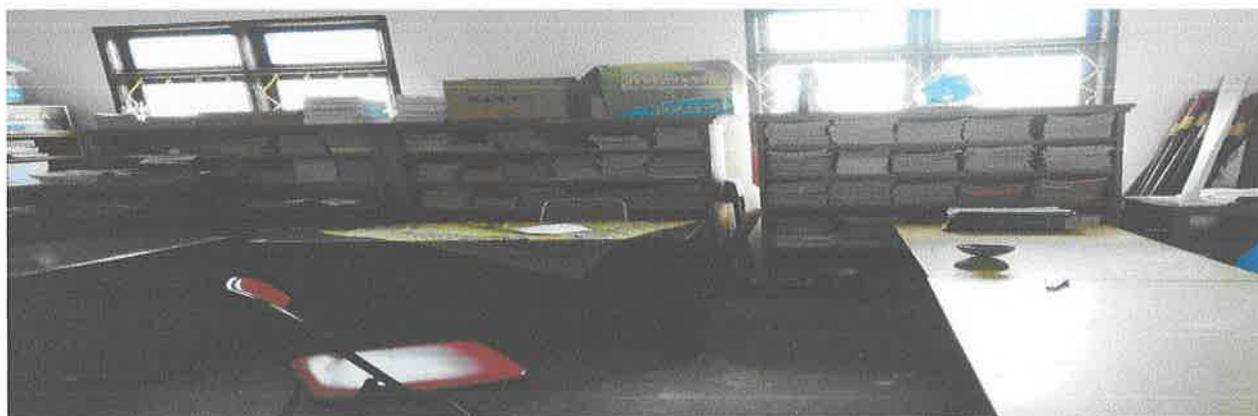
**2. Ruang Kepala Sekolah**

Lemari, Kipas Angin, dan Gambar-gambar dibeli dengan dana BOS



3. Ruang kantor guru

Meja, Kursi, serta Rak, Papan Data di Beli dengan Dana BOS



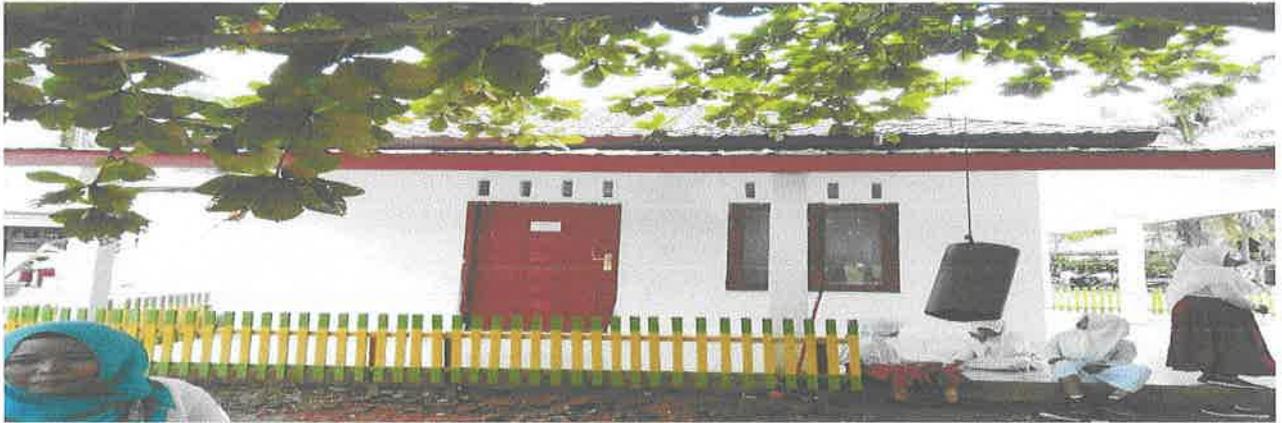
4. Ruang perpustakaan

Buku-buku di Beli dengan Dana BOS



5. Gedung perpustakaan

Pengecatan Gedung dengan Dana BOS



6. Gedung mushala

Pengecatan Gedung dengan Dana BOS

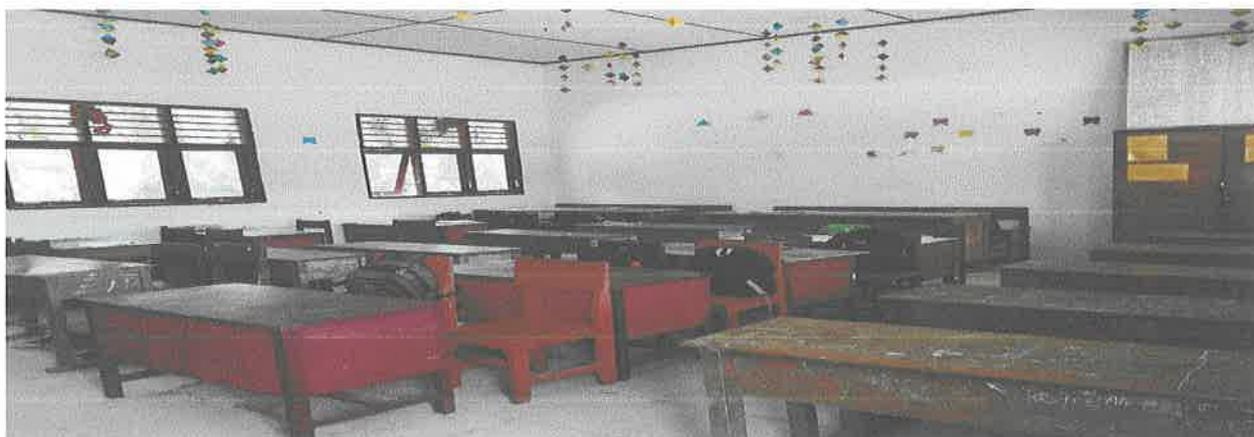


7. Mushala tampak dari dalam



8. Ruang kelas tampak dari luar

Pengecatan, Perondapan dengan Dana BOS



9. Ruang kelas tampak dari dalam
Meubeler di Beli dengan Dana BOS



10. Toilet tampak dari luar
Pengecatan dengan Dana BOS



11. Toilet tampak dari dalam
Rehab Ruang dengan Dana BOS